



#AKHLAK

Kota Solo



Solo
THE SOLO OF SOLO

Profil

Sekretariat Daerah Kota Surakarta

2022

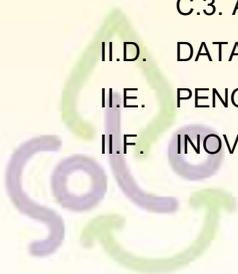


SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA



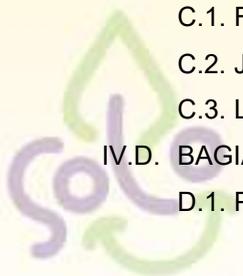
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.A. LATAR BELAKANG	1
I.B. TUJUAN	2
I.C. RUANG LINGKUP	3
BAB II	4
GAMBARAN UMUM PROFIL PERANGKAT DAERAH	4
II.A. VISI MISI KOTA SURAKARTA	4
II.B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA	4
B.1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah:	5
B.2. Asisten, terdiri dari 3 Asisten dan yang membawahi Bagian antara lain meliputi:	5
II.C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	9
C.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10
C.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14
C.3. Asisten Administrasi Umum	20
II.D. DATA SUMBER DAYA MANUSIA	25
II.E. PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH	30
II.F. INOVASI PERANGKAT DAERAH	32

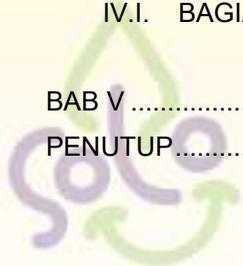




BAB III.....	37
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	37
III.A. CAPAIAN RPJMD.....	37
III.B. CAPAIAN SDG'S	45
III.C. CAPAIAN SIPD.....	49
III.D. CAPAIAN LPPD OUTCOME	58
BAB IV	64
DATA CAPAIAN PER BAGIAN DI SEKRETARIAT DAERAH	64
IV.A. BAGIAN UMUM	64
A.1. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	65
A.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	72
A.3. Peminjaman Gedung /Ruang rapat	74
IV.B. BAGIAN ORGANISASI.....	78
B.1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	78
B.2. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang diikuti dalam KIPP	80
B.3. Jumlah UPP yang melaksanakan SKM	82
B.4. Jumlah Dokumen PK dan LKjIP.....	84
B.5. Jumlah Dokumen Fasilitasi PMPRB	85
IV.C. BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	86
C.1. Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan Daerah	86
C.2. Jumlah Sambutan yang diterbitkan.....	88
C.3. Layanan Persuratan Pimpinan.....	89
IV.D. BAGIAN HUKUM	91
D.1. Penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Daerah	92



D.2. Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	94
D.3. Pendampingan Hukum Pelaksanaan Pembangunan Daerah	95
D.4. Sosialisasi Peraturan Daerah	97
IV.E. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	98
E.1. Jumlah Naskah Kerjasama yang Terimplementasi (Dalam Negeri dan Luar Negeri).....	98
E.2. Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan.....	102
IV.F. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.....	106
F.1. Fasilitasi Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan	108
IV.G. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	113
G.1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Paket Pembangunan Infrastruktur	114
G.2. Jumlah Monitoring dan Pengendalian Capaian Realisasi SKPD	119
IV.H. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM..	121
H.1. Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCT).....	121
H.2. Pelaksanaan kegiatan DBHCT Tahun Anggaran 2022 adalah:	124
H.3. Pembinaan BUMD	127
H.4. Pembinaan BLUD	129
H.5. TJSP atau CSR.....	131
IV.I. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.....	134
BAB V	139
PENUTUP.....	139





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta	8
Gambar 2.2	Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2022	31
Gambar 2.3	Piagam Penghargaan Agen Perubahan Setda Tahun 2022	32
Gambar 4.1	Denah Komplek Balaikota	65
Gambar 4.2	Ruang Rapat Gedung DKK Lantai 3 sisi selatan	75
Gambar 4.3	Ruang Rapat Bale Tawangarum	76
Gambar 4.4	Aplikasi Sijalakoar	82
Gambar 4.5	Aplikasi SiMONAS	92
Gambar 4.6	Aplikasi Makan Jadah	101
Gambar 4.7	Aplikasi SIPKE-MAS	108
Gambar 4.8	Aplikasi Simonela	116
Gambar 4.9	Laporan Progres Monitoring Semua Bulan Ta.2022	117
Gambar 4.10	Aplikasi Simdalbangda	120
Gambar 4.11	Alokasi DBHCT Kota Surakarta TA 2017-2022	125
Gambar 4.12	Proporsi Anggaran DBHCT Kota Surakarta TA 2022	126
Gambar 4.13	Perbandingan Realisasi Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA TA 2019-2022	126
Gambar 4.14	Aplikasi e-TJSP	134



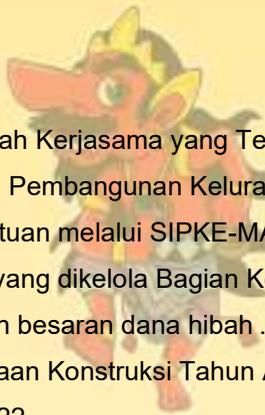
The Spirit of Java





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai per Bagian berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Setda berdasarkan Kategori	28
Tabel 2.3 Inovasi Perangkat Daerah	32
Tabel 3.1 CAPAIAN RPJMD	37
Tabel 3.2 CAPAIAN SDG'S	45
Tabel 3.3 CAPAIAN SIPD.....	49
Tabel 3.4 CAPAIAN LPPD OUTCOME	58
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	66
Tabel 4.2 Perbandingan Capaian Anggaran TA 2021 dan TA 2022.....	72
Tabel 4.3 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	73
Tabel 4.4 Gedung dan Ruang Rapat yang dikelola Bagian Umum	74
Tabel 4.5 Jumlah Pemakaian Gedung dan Ruang Rapat.....	77
Tabel 4.6 Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan ..	79
Tabel 4.7 Inovasi Perangkat Daerah yang Diikutkan dalam KIPP	81
Tabel 4.8 UPP yang melaksanakan SKM	83
Tabel 4.9 Jumlah Dokumen PK dan LKJIP	85
Tabel 4.10 Jumlah Dokumen Fasilitasi PMPRB.....	85
Tabel 4.11 Layanan Keprotokolan Pimpinan Daerah.....	87
Tabel 4.12 Sambutan yang diterbitkan.....	88
Tabel 4.13 Layanan Persuratan Pimpinan	90
Tabel 4.14 Perbandingan Produk hukum berdasarkan jenis keputusan tahun 2022 2021	93
Tabel 4.15 Pendampingan Hukum Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Bagian Hukum	96

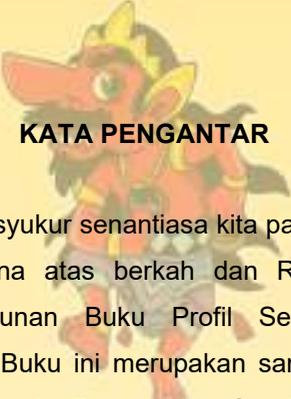


Tabel 4.16 Jumlah Naskah Kerjasama yang Terimplementasi.....	100
Tabel 4.17 Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan Tahun 2022	102
Tabel 4.18 Program bantuan melalui SIPKE-MAS.....	107
Tabel 4.19 Dana Hibah yang dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat...	109
Tabel 4.20 Penerima dan besaran dana hibah	110
Tabel 4.21 Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022	118
Tabel 4.22 Serapan OPD dibawah rerata TA 2021 dan TA 2022	120
Tabel 4.23 Pelaksanaan Kegiatan DBHCT Kota Surakarta Tahun 2022..	124
Tabel 4.24 BUMD di Kota Surakarta	127
Tabel 4.25 UPT yang Menerapkan PPK-BLUD di Kota Surakarta	130
Tabel 4.26 Jumlah Penerimaan CSR di Kota Surakarta	133
Tabel 4.27 Jumlah tender terselesaikan Tahun Anggaran 2021 dan 2022	135
Tabel 4.28 Efisiensi Anggaran pada Tender yang Terselesaikan TA 2021	136
Tabel 4.29 Efisiensi Anggaran pada Tender yang Terselesaikan TA 2022	137



The Spirit of Java





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan Rahmat-nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Profil Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023. Buku ini merupakan sarana publikasi penyajian data dan informasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta secara umum, juga memberikan informasi keberhasilan dan pencapaian kinerja 9 (Sembilan) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023.

Buku Profil Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 ini dikemas sedemikian rupa, hingga menyajikan gambaran umum yang informatif dan menyeluruh. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjembatani serta memfasilitasi semua data dan informasi yang diperlukan, serta diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data, usulan dan masukan sehingga Buku Profil ini dapat tersusun dengan baik. Dan semoga apa yang terangkum dalam Buku Profil ini bermanfaat bagi Pemerintah Kota Surakarta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.



The Spirit of Java





BAB I

PENDAHULUAN

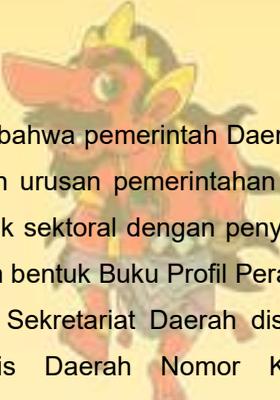
I.A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Daerah Kota Surakarta merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota Terkait Tugas dan Fungsinya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



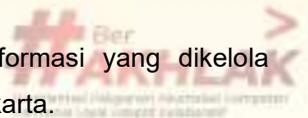
Kerja, disebutkan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik untuk sub urusan statistik sektoral dengan penyusunan kompilasi produk administrasi dalam bentuk Buku Profil Perangkat Daerah.

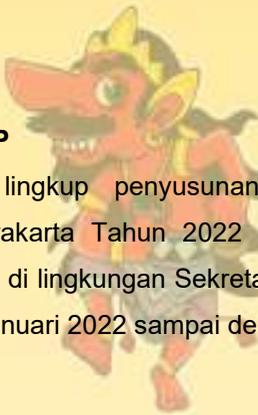
Buku Profil Sekretariat Daerah disusun berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor KI.05/4791/2022 tentang Pedoman penyusunan buku profil Perangkat Daerah. Buku Profil Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang disusun sebagai sarana publikasi penyajian data statistik yang dimiliki 9 (sembilan) bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Surakarta untuk periode tahunan. Penyusunan Buku Profil Sekretariat Daerah Tahun 2022 diharapkan dapat digunakan sebagai penyedia data dan informasi yang akurat dalam rangka evaluasi perencanaan pencapaian program kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

I.B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Buku Profil Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta,
2. Memberikan gambaran data capaian kinerja lingkungan Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2022,
3. Menyusun data statistik di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Surakarta untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan, dan
4. Mendokumentasikan data dan informasi yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Surakarta.





I.C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Buku Profil Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 dibatasi pada data dari 9 (sembilan) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Surakarta mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.



The Spirit of Java





BAB II

GAMBARAN UMUM PROFIL PERANGKAT DAERAH

II.A. VISI MISI KOTA SURAKARTA

VISI : Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera

MISI :

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang menudukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga
5. Megembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotongroyong
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan

II.B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan



Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

B.1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah:

- (1). Sekretaris Daerah;
- (2). Asisten;
- (3). Bagian;
- (4). Kelompok Jabatan Fungsional.

B.2. Asisten, terdiri dari 3 Asisten dan yang membawahi Bagian antara lain meliputi:

(1). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, selaku koordinator atas:

a.) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:

- a.1.) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan;
- a.2.) Sub Koordinator Otonomi Daerah; dan
- a.3.) Sub Koordinator Kerja Sama;

b.) Bagian Hukum, terdiri atas:

- b.1.) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b.2.) Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan
- b.3.) Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum.





c.) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

c.1.) Sub Koordinator Bina Mental Spiritual; dan

c.2.) Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;

(2). Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, selaku koordinator atas:

a.) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :

a.1.) Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha

Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

a.2.) Sub Koordinator Pengendalian Perekonomian, UMKM dan Ekonomi Kreatif; dan

a.3.) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam.

b.) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

b.1.) Sub Koordinator Penyusunan dan Pengendalian Program Pembangunan; dan

b.2.) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

c.) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:

c.1.) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

c.2.) Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan

c.3.) Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.





(3). Asisten Administrasi Umum.

Asisten Administrasi Umum, selaku koordinator atas:

a.) Bagian Organisasi, terdiri atas:

- a.1.) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- a.2.) Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
- a.3.) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

b.) Bagian Umum terdiri atas:

- b.1.) Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
- b.2.) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
- b.3.) Sub Koordinator Perlengkapan;

c.) Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan terdiri atas:

- c.1.) Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan;
- c.2.) Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan; dan
- c.3.) Subbagian Protokol dan Rumah Tangga;

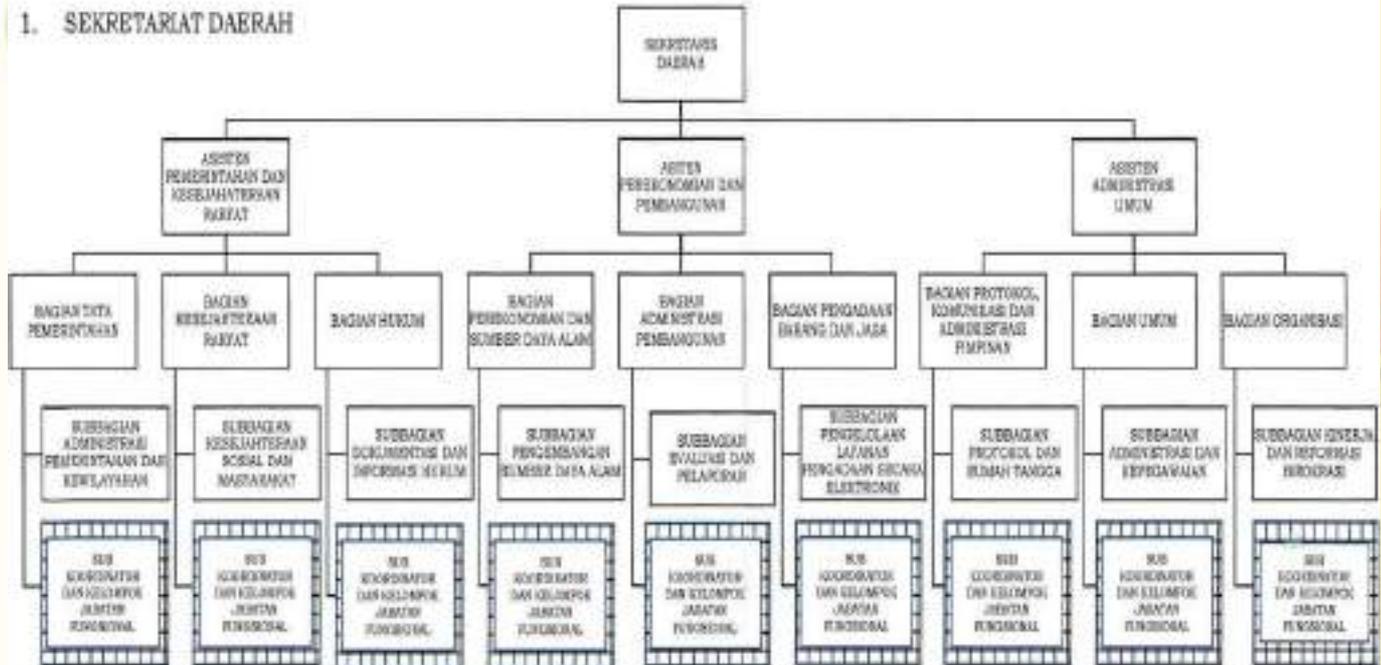


The Spirit of Java





1. SEKRETARIAT DAERAH



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

II.C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut: Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- (1). pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- (2). pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- (3). pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- (4). pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- (5). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dari masing-masing unit kerja di Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

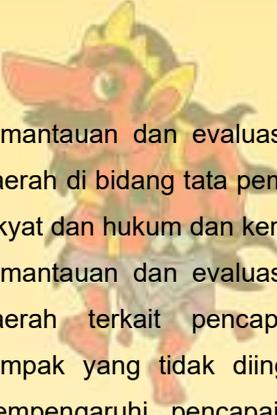


C.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerja sama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan hukum;
- 2) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Pertanahan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat, Kewilayahan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pangan, dan **Transmigrasi**;



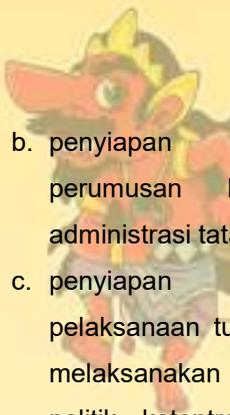
- 
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum dan kerja sama;
 - 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - 6) penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(1) Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, penyiapan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah. Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah terkait administrasi tata pemerintahan;

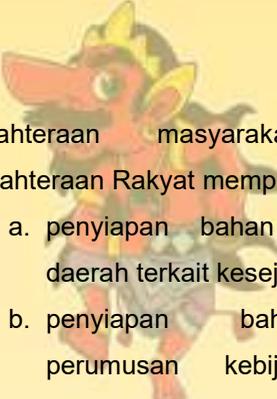


- 
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah terkait administrasi tata pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, kewilayahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pertanahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait administrasi tata pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat,

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, penyiapan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi terkait bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan





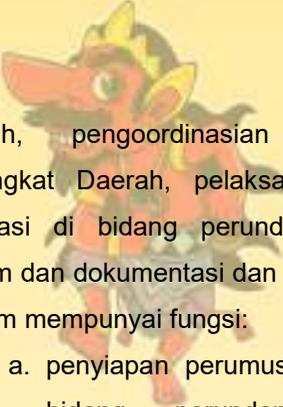
kesejahteraan masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah terkait kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah terkait kesejahteraan rakyat;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja, Perpustakaan, Kearsipan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pangan, dan Transmigrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait kesejahteraan rakyat;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bagian Hukum

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan



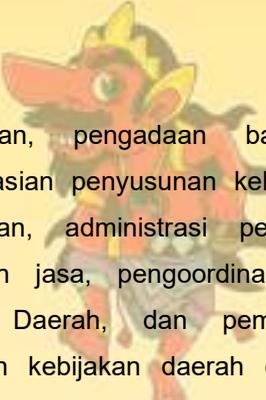


daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

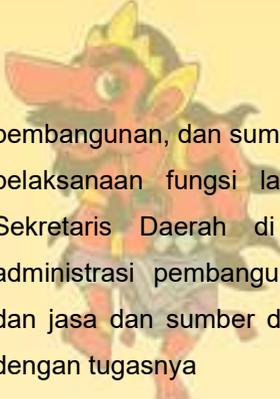
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi



pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1.) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
- 2.) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Perhubungan;
- 3.) penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- 4.) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- 5.) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi





pembangunan, dan sumber daya alam; dan

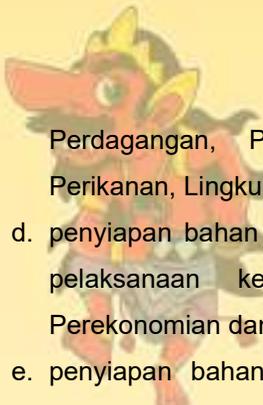
6.) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya

(1) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, penyiapan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian perekonomian UMKM dan ekonomi kreatif serta sumber daya alam. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah terkait perekonomian dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah terkait perekonomian dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Perindustrian,





Perdagangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup;

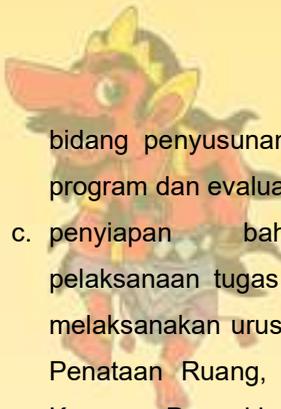
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian perekonomian UMKM dan Ekonomi Kreatif serta Pengembangan Sumber Daya Alam; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian program pembangunan dan evaluasi dan pelaporan. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di





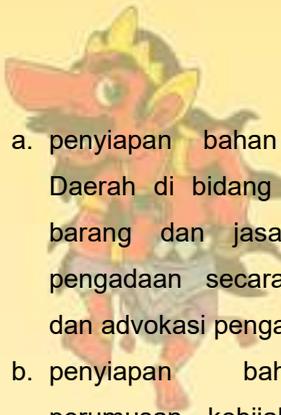
bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Perhubungan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:





- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



C.3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi, Administrasi Pimpinan, Umum dan Organisasi. Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan
- 3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan.
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- 5) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- 6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- 7) penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan





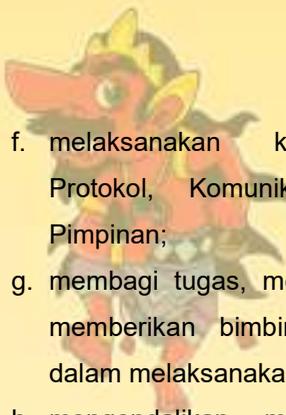
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

(1) Kepala Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan

Kepala Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, komunikasi pimpinan, protokol dan rumah tangga. Kepala Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan pimpinan daerah;
- c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas pada Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota serta Sekretaris Daerah;
- e. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;



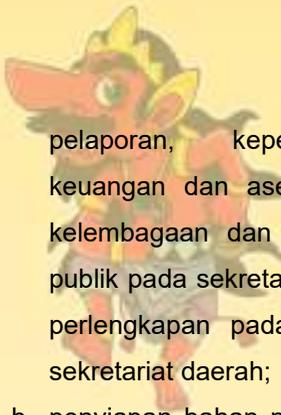
- 
- f. melaksanakan ketatausahaan Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan;
 - g. membagi tugas, memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas,
 - h. mengendalikan, meneliti dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan,
 - i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawain, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik pada sekretariat daerah serta fasilitasi perlengkapan pada pimpinan daerah dan sekretariat daerah. Kepala Bagian Umum memiliki fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian pengelolaan perencanaan, melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, monitoring, evaluasi dan





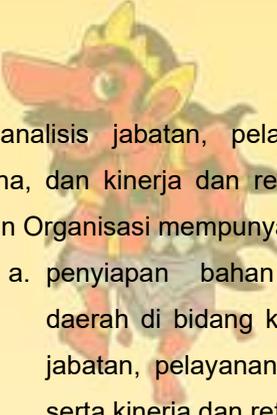
pelaporan, kepegawain, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik pada sekretariat daerah serta fasilitasi perlengkapan pada pimpinan daerah dan sekretariat daerah;

- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawain, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik pada sekretariat daerah serta fasilitasi perlengkapan pada pimpinan daerah dan sekretariat daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bagian Organisasi

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan





dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

II.D. DATA SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu perangkat daerah tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia atau Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin hal tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa pengelolaan ASN didasarkan pada Sistem Merit. Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Surakarta didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 292 pegawai terdiri dari 150 ASN dan 142 orang Non ASN orang yang tersebar di 9 (sembilan) bagian. Berikut rincian pegawai di Sekretariat Daerah berdasarkan beberapa kategori:

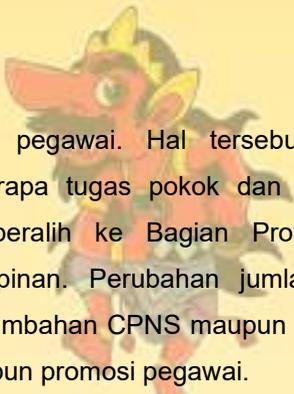
Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai per Bagian berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bagian	Jenis Kelamin	ASN		Non ASN		Total	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Organisasi	Laki-Laki	7	5	4	3	11	8
		Perempuan	5	8	4	4	9	12
2	Umum	Laki-Laki	23	14	86	72	109	86
		Perempuan	14	8	12	4	26	12



No	Bagian	Jenis Kelamin	ASN		Non ASN		Total	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
3	Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan	Laki-Laki	12	28	6	20	18	48
		Perempuan	4	13	3	10	7	23
4	Tata Pemerintahan	Laki-Laki	4	8	2	2	6	10
		Perempuan	6	5	1	2	7	7
5	Kesra	Laki-Laki	6	5	4	4	10	9
		Perempuan	6	4	2	2	8	6
6	Hukum	Laki-Laki	7	7	3	3	10	10
		Perempuan	9	8	3	3	12	11
7	Perekonomian dan SDA	Laki-Laki	1	1	2	2	3	3
		Perempuan	7	7	2	2	9	9
8	Administrasi Pembangunan	Laki-Laki	4	3	3	3	7	6
		Perempuan	4	4	2	2	6	6
9	Pengandaan Barang dan Jasa	Laki-Laki	14	11	3	3	17	14
		Perempuan	10	11	1	1	11	12
Total			143	150	143	142	286	292

Total keseluruhan pegawai pada tahun 2021 sebanyak 286 orang, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 292. Pada tahun 2022 terdapat 194 pegawai laki-laki dan 98 pegawai perempuan. Jumlah Pegawai perempuan sebanyak 33.56% dari total keseluruhan pegawai, Jumlah pegawai di masing-masing bagian berbeda karena disesuaikan dengan perhitungan analisa jabatan dan beban kerja di setiap bagian. Jika diperhatikan, terdapat peningkatan maupun penurunan yang cukup signifikan di Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan serta Bagian Umum. Bagian Umum yang semula 135 pegawai pada tahun 2021 menurun menjadi 98 pegawai atau mengalami penurunan sebanyak 37 pegawai. Sedangkan untuk Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan mengalami



penambahan 46 pegawai. Hal tersebut dikarenakan adanya pergeseran beberapa tugas pokok dan fungsi yang semula di Bagian Umum beralih ke Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan. Perubahan jumlah pegawai juga tidak terlepas dari penambahan CPNS maupun PPPK, pegawai pensiun serta mutasi maupun promosi pegawai.

Dari 292 pegawai di Sekretariat Daerah yang tersebar di 9 Bagian, berikut rincian pegawai berdasarkan Kategori Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan, Golongan, dan Kelompok Jabatan.



The Spirit of Java

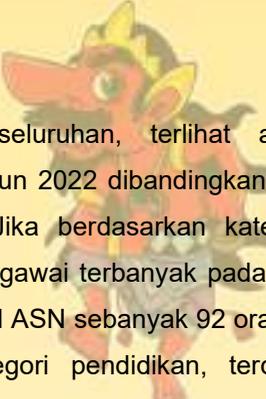


Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Setda berdasarkan Kategori

Kategori		2021				2022			
		ASN		Non-ASN		ASN		Non-ASN	
		L	P	L	P	L	P	L	P
Umur	20 Kebawah	0	0	0	0	0	0	1	0
	21 - 30 thn	12	9	45	28	17	16	35	24
	31 - 40 thn	20	17	50	1	18	23	37	3
	41 - 50 thn	28	22	17	1	26	21	31	2
	51 - 60 thn	18	17	1	0	21	8	8	1
Jumlah		78	65	113	30	82	68	112	30
Pendidikan	SD	2	0	0	0	2	0	1	0
	SMP	0	0	0	0	2	0	0	0
	SMA	10	9	92	12	13	9	89	10
	D1	0	2	1	0	0	0	1	0
	D3	8	7	3	3	13	8	4	4
	S1	45	32	17	14	38	42	17	15
	S2	13	15	0	1	14	9	0	1
	S3	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		78	65	113	30	82	68	112	30



Kategori		2021				2022			
		ASN		Non-ASN		ASN		Non-ASN	
		L	P	L	P	L	P	L	P
Golongan	IV	13	10	0	0	11	6	0	0
	III	43	44	0	0	47	52	0	0
	II	20	11	0	0	20	10	0	0
	I	2	0	0	0	4	0	0	0
	Non Golongan (TKPK)	0	0	113	30	0	0	112	30
Jumlah		78	65	113	30	82	68	112	30
Kelompok Jabatan	Struktural	16	15	0	0	8	10	0	0
	Fungsional	12	6	0	0	22	14	0	0
	Pelaksana	50	44	0	0	52	44	0	0
	Non-Jabatan (TKPK)	0	0	113	30	0	0	112	30
Jumlah		78	65	113	30	82	68	112	30



Secara keseluruhan, terlihat ada peningkatan jumlah pegawai pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 pada setiap kategori. Jika berdasarkan kategori umur, rentang usia dengan jumlah pegawai terbanyak pada tahun 2022 adalah 21-30 tahun dengan total ASN sebanyak 92 orang atau sebanyak 31,5 %. Berdasarkan kategori pendidikan, terdapat kenaikan 4 orang ditahun 2022 yang semula 108 menjadi 112. Jumlah pegawai terbanyak dari kategori pendidikan adalah adalah 121 pegawai berpendidikan SMA sederajat. Untuk kategori golongan, jumlah pegawai terbanyak adalah Non Golongan (TKPK) sebanyak 142 pegawai dari 292 pegawai atau 48% pada tahun 2022. Hal tersebut tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 143 TKPK dari total pegawai 286 atau sebanyak 50%.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi, beberapa pejabat struktural untuk eselon 4 (Pejabat Pengawas) mengalami penyetaraan jabatan (menjadi pejabat fungsional) yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas, untuk kelompok jabatan struktural terdapat penurunan jumlah dari tahun 2021 yang semula 31 orang menjadi 18 orang di tahun 2022. Begitupun sebaliknya, untuk kelompok jabatan fungsional mengalami peningkatan dari 18 orang di tahun 2021 menjadi 36 orang di tahun 2022.

II.E. PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah berhasil meraih 3 penghargaan baik di tingkat Kota Surakarta, Provinsi maupun Nasional. Penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2022.

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas prestasi dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Gambar 2. 2 Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2022

2) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik ke IV se Jawa Tengah.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan Monev Pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Surakarta oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator tertentu sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8

Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

3) Juara II Agen Perubahan tingkat Kota Surakarta.

Sekretariat Daerah memperoleh Juara II Lomba Agen Perubahan Tahun 2022 dengan mengusung inovasi Bantuan Hukum untuk Warga Miskin “Bahu Gakin”.



Gambar 2. 3 Piagam Penghargaan Agen Perubahan Setda Tahun 2022

II.F. INOVASI PERANGKAT DAERAH

Sebagai upaya perbaikan dalam memberikan pelayanan publik, Sekretariat Daerah menciptakan maupun mengembangkan inovasi. Berikut inovasi-inovasi yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Surakarta :

Tabel 2. 3 Inovasi Perangkat Daeah

No	Inovasi	Keterangan
1	Pengelolaan Manajemen Risiko Melalui Aplikasi	Untuk mendukung capaian SAKIP yang tinggi maka perlu adanya suatu pengelolaan risiko atas proses pencapaian indikator yang sudah direncanakan oleh masing-masing OPD dalam dokumen perencanaannya. Sehingga OPD

No	Inovasi	Keterangan
		<p>dapat mengidentifikasi setiap risiko yang mungkin muncul dalam proses pencapaian indikator dan membuat Rencana Tindak Pengendalian atas risiko tersebut. Proses tersebut dinamakan Manajemen Risiko dan bagian Administrasi Pembangunan membangun suatu aplikasi dimana OPD dapat melakukan Manajemen Risiko melalui aplikasi Surakarta Risk Manajemen Indeks System. Kedepan aplikasi tersebut akan bertintegrasikan dengan aplikasi Maturitas SPIP sehingga dapat memudahkan kinerja admin OPD dalam proses Manajemen Risiko</p>
2	Sistem Informasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	<p>SipKe-Mas merupakan Sistem Informasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan berkoordinasi dengan Bappeda dan Dinas Sosial Kota Surakarta. Aplikasi ini bertujuan untuk kemudahan pengajuan bantuan sistem digital secara cepat dan tepat. Program ini menggandeng Forum Kesra (PMI, Lazis Jateng Cab Solo, Baznas dan PMS) yang bersinergi bersama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Surakarta.</p>
3	Sidalang Mantap Berkontrak	<p>Sidalang Mantap Berkontrak (Sistem Pendaftaran Lelang dan Manajemen Administrasi Pelaporan) merupakan aplikasi yang dibuat oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur unggulan, antara lain untuk menyimpan data lelang, membuat Surat Keputusan dan Berita Acara terkait Pokja Pemilihan beserta pelaksanaan lelang, memantau beban kerja Pokja Pemilihan, membuat e-kontrak pekerjaan, dan melakukan penilaian kinerja penyedia.</p>

No	Inovasi	Keterangan
4	Podcast BPBJ	Podcast BPBJ merupakan kegiatan yang dibuat oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan secara rutin untuk mendampingi dan meningkatkan pemahaman pelaku pengadaan barang jasa di Kota Surakarta. Podcast BPBJ bertujuan untuk memberikan ruang khusus guna mensosialisasikan, mengedukasi, dan mendiskusikan mengenai peraturan maupun kebijakan baru mengenai pengadaan barang dan jasa kepada PA/KPA, Pokja Pemilihan, maupun Pejabat Pembuat Komitmen. Narasumber dari kegiatan podcast ini antara lain internal BPBJ, Kejaksanaan, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dan berkompeten di bidang pengadaan barang dan jasa.
5	e-LKPJ	Aplikasi e-LKPJ adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta tiap tahunnya. Aplikasi ini dibuat sehingga dapat memudahkan tiap-tiap organisasi perangkat daerah dalam memasukkan data terkait capaian indikator Program dan Kegiatan mereka dan data-data lain yang terkait dengan LKPJ.
6	Makan Jadah	Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Makan Jadah) adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu Sub Koor Kerjasama dalam penyusunan kerjasama. Aplikasi ini juga membantu pihak-pihak yang ingin melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk mengerti dan memahami urutan langkah-langkah dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan kerjasama.



No	Inovasi	Keterangan
7	Sanja Simbak	Sanja Simbak (Sistem Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja) adalah Aplikasi yang dibuat untuk Perhitungan Analisa Jabatan, analisa Beban kerja, dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar penentu Kebutuhan ASN masing2 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Pengembangan Aplikasi ini ke depannya setiap Informasi setiap jabatan langsung diisikan Indikator Kinerja Individu.
8	Sijalak Koar	Sijalak Koar (Sistem Kinerja Pelayanan Publik Kota Surakarta) adalah Aplikasi pelayanan publik yang dikembangkan untuk mengintegrasikan data penyusunan Proses Bisnis, SOP seluruh Perangkat Daerah serta memonitoring pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat UPP secara periodik dan sedang dikembangkan untuk Penilaian Mandiri Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah serta pelaporan data Standar Pelayanan (SP)
9	e-SAKIP	Aplikasi e-SAKIP adalah aplikasi yang dibuat untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Dibuat pada akhir tahun 2022, aplikasi ini dikembangkan di tahun 2023 dengan menambah menu Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan yang diintegrasikan dengan SIPPD dan aplikasi kepegawaian
10.	Sistem Monitoring Asman (SiMONAS) ver. 2.11.0	Simonas diaplikasikan untuk membantu OPD Pemrakarsa dalam mengajukan asman Produk Hukum kepada Walikota/Sekda, pada pengembangan tahun 2022 Simonas memudahkan pengguna dalam memperoleh notifikasi proses selain email ditambah whatsapp dan dapat memfilter penugasan kepada korektor, sedangkan



No	Inovasi	Keterangan
		untuk proyeksi pengembangan di tahun 2023 Simonas bisa memfilter durasi waktu proses dan lokasi pertahapan.
11.	JDIH	Aplikasi JDIH pada tahun 2022 dilakukan penambahan menu download untuk Produk Hukum terjemahan dan penambahan statistika jumlah dan jenis produk hukum, sedangkan untuk pengembangan pada Tahun 2023, aplikasi JDIH akan dibangun ulang menyesuaikan perkembangan sistem operasi dan memenuhi kaidah standar pengelolaan website sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum



The Spirit of Java





BAB III

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

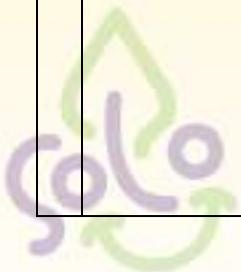
III.A. CAPAIAN RPJMD

Tabel 3. 1. CAPAIAN RPJMD

No	Capaian Indikator	2021	2022	Keterangan
1	Indeks reformasi birokrasi	68,36	70,78	<p>Hasil penilaian Indeks RB Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PermenPAN RB menunjukkan bahwa Kota Surakarta memperoleh nilai Indeks RB sebesar 70,78 (kategori BB), meningkat dari nilai tahun 2021 sebesar 68,90 (kategori B). Dengan realisasi nilai 70,78 maka indikator Indeks RB tercapai 96,95% dari target nilai 73.</p> <p>Beberapa faktor yang mendorong peningkatan indeks RB antara lain adanya upaya perbaikan berkelanjutan atas komponen hasil antara, perbaikan penyelenggaraan SPBE, bertambahnya unit kerja dengan predikat WBK, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.</p> <p>Beberapa faktor penghambat tidak tercapainya target Indeks RB yaitu belum semua agen perubahan memiliki target kerja yang berkontribusi pada organisasi, belum optimalnya evaluasi terhadap sistem pengendalian dalam penyusunan perundang-undangan,</p>

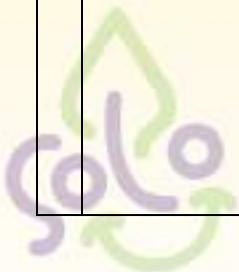


No	Capaian Indikator	2021	2022	Keterangan
				belum selesainya integrasi aplikasi dalam penyelenggaraan SPBE, kurangnya keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi, dan masih adanya OPD yang belum menetapkan standar pelayanan dan kompensasi apabila layanan tidak sesuai dengan standar. Di tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi dengan tema Strategi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta guna mendorong reformasi birokrasi menjadi semakin baik di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Penetapan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 39 tentang Pedoman Penerapan Budaya Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
2	Maturitas Kelembagaan	41,8	45	Hasil perhitungan penilaian tingkat kematangan penataan perangkat daerah diperoleh nilai total 1.576 dengan jumlah perangkat daerah sebanyak 35, sehingga diperoleh Nilai Kematangan Organisasi Daerah sebesar 45 (Tingkat Kematangan Tinggi) yang meningkat dari nilai tahun 2021 sebesar 41.8.





No	Capaian Indikator	2021	2022	Keterangan
				<p>Dengan realisasi ini, maka capaian kinerja indikator mencapai 121,29% (Sangat Berhasil) dari target nilai 37,10. Faktor pendorong meningkatnya nilai yaitu pemenuhan data dukung 11 variabel yang lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. 11 Variabel penilaian tersebut terdiri dari variabel perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu pelayanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. Selain itu juga didukung oleh penataan organisasi dan tata laksana yang baik. Hasil ini dapat dicapai melalui upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 diantaranya berupa sosialisasi dan desk maturitas kelembagaan yang intens terkait data dukung 11 variabel penilaian KOD yang memberikan dampak signifikan akan kenaikan nilai maturitas kelembagaan.</p>

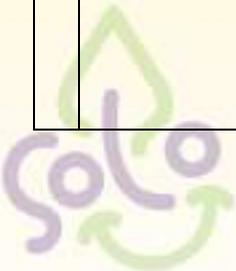




No	Capaian Indikator	2021	2022	Keterangan
3	Persentase kerjasama yang diimplementasikan dari MoU yang ada	83,78	96,33	Sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan 109 kesepakatan bersama yang terdiri dari 16 kerja sama dengan daerah lain (KSSD), 61 kerja sama dengan pihak ketiga (KSDPK), 26 sinergi pembangunan daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan 6 kerja sama dengan pihak luar negeri (KSDLN). Dari 109 kesepakatan bersama tersebut sebanyak 105 kesepakatan bersama telah terimplementasi oleh Perangkat Daerah di Kota Surakarta, sehingga persentase kerjasama yang terimplementasi pada Tahun 2022 sebesar 96,33%. Sedangkan pada Tahun 2021 terdapat 74 kesepakatan bersama dan yang telah terimplementasi sebanyak 62 kesepakatan bersama, sehingga persentase kerjasama yang terimplementasi pada Tahun 2021 sebesar 83,78%.
4	Persentase Maturitas PD dengan level 3	100	100	Dari hasil penilaian kematangan organisasi diperoleh bahwa 35 Perangkat daerah mendapatkan skor antara 40 - 49. Berdasarkan Permen PAN RB No. 99 Tahun 2018, skor antara



No	Capaian Indikator	2021	2022	Keterangan
				<p>37,1-46 masuk dalam kategori Tingkat Kematangan Tinggi, dan skor 46,1-55 masuk kategori Tingkat Kematangan Sangat Tinggi. Jika dikonversikan maka kategori perangkat daerah masuk dalam level 4 dan 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 100% perangkat daerah telah mencapai maturitas diatas level 3. Target kinerja tahun 2022 untuk persentase maturitas PD dengan level 3 ditetapkan sebesar 44%, dengan demikian kinerja telah tercapai 227,27% dari target. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi tahun 2022 masih sama 100%. Faktor pendorong : setiap perangkat daerah telah memenuhi variabel penilaian, dan mayoritas mendapat skor 4 di setiap variabel. Hal ini dapat dicapai berkat upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 berupa sosialisasi dan desk yang mampu meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam meningkatkan maturitas kelembagaan dan memenuhi data dukung yang dibutuhkan.</p>





No	Capaian Indikator	2021	2022	Keterangan
5	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan/operasional pimpinan dan kesekretariatan daerah	100	100	Pelayanan kedinasan / Operasional pimpinan dan kesekretariatan daerah yang terdiri dari fasilitasi keprotokolanan, fasilitasi komunikasi pimpinan dan layanan persuratan pimpinan dapat dapat tercover 100%
6	Rata-rata capaian kinerja IKK LPPD urusan pemerintah daerah	81,25	73,92	Rata-rata capaian kinerja IKK LPPD diperoleh dari penilaian kinerja mandiri atas capaian kinerja IKK Outcome berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020, total teradpat 126 IKK Outcome terisi sebanyak 117 IKK dan 9 IKK Tidak Ditemukan Data dan Informasi (TDI) dan/atau bukan kewenangan
7	Persentase peningkatan partisipasi lembaga dalam bidang kesejahteraan rakyat	100	100	Lembaga yang berkomitmen pada bidang kesejahteraan rakyat tergabung dalam Forum Kesra sejumlah 4 lembaga yaitu BAZNAS, PMI Surakarta, Lazis Jateng Cabang Surakarta dan PMS. Keempat lembaga tersebut memiliki beberapa program bantuan yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan ikut berpartisipasi dalam aplikasi Sistem Informasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (SIPKEMAS) yang dibuat oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta. Keempat



No	Capaian Indikator	2021	2022	Keterangan
				lembaga tersebut aktif berpartisipasi dengan program-program yang dimiliki.
8	Persentase kinerja pemerintah daerah dalam bidang hukum	100	98,97	prosentase kinerja bidang Hukum dapat dilihat dari hasil produk hukum pengaturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Daerah sejumlah 12 produk dan Perwali 85 produk, atau mengalami penurunan menjadi sebesar 98,97% jika dibanding dengan Target Renstra 97 produk. Hal ini disebabkan dinamika perencanaan, penyusunan, serta pembahasan dari OPD Pemrakarsa
9	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	66,6	12,55	Sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan 109 kesepakatan bersama yang terdiri dari 16 kerja sama dengan daerah lain (KSDD), 61 kerja sama dengan pihak ketiga (KSDPK), 26 sinergi pembangunan daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan 6 kerja sama dengan pihak luar negeri (KSDLN). Dari 109 kesepakatan bersama tersebut sebanyak 105 kesepakatan bersama telah terimplementasi oleh Perangkat Daerah di Kota Surakarta, sehingga persentase kerjasama yang terimplementasi pada Tahun 2022



No	Capaian Indikator	2021	2022	Keterangan
				sebesar 96,33%. Sedangkan pada Tahun 2021 terdapat 74 kesepakatan bersama dan yang telah terimplementasi sebanyak 62 kesepakatan bersama, sehingga persentase kerjasama yang terimplementasi pada Tahun 2021 sebesar 83,78%. Sehingga persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi sebesar 12,55%.
10	Manajemen Risiko Indeks	3	3	Nilai Manajemen Risiko Indeks antara tahun 2021 dan 2022 memiliki nilai sama namun dengan metode Penilaian dari BPKP yang berbeda. Penilaian ditahun 2022 meskipun jenisnya penilaian cepat namun instrumen dan kedalaman penilaian lebih mendetail terhadap pengelolaan Manajemen Risiko Pemda. Setda selaku koordinator pengelolaan Manajemen Risiko akan terus berupaya dan berinovasi untuk pengelolaan Manajemen Risiko yang lebih baik ditahun kedepannya meskipun target akhir Nilai Manajemen Risiko Indeks dalam RPJMD adalah 3
11	Tingkat maturitas kelembagaan UKPBJ	7	8	Jumlah keseluruhan level maturitas kelembagaan UKPBJ adalah 9 level. Pada tahun 2021, pencapaian level maturitas kelembagaan adalah 7 dari 9.

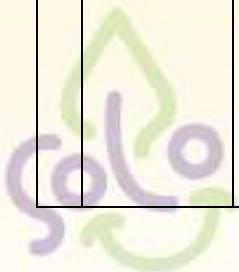


No	Capaian Indikator	2021	2022	Keterangan
				Sedangkan pada tahun 2022, pencapaian level maturitas kelembagaan UKPBJ adalah 8 dari 9 dengan penambahan pada level Sistem Informasi, sehingga masih terdapat kekurangan 1 level, yaitu Perencanaan SDM Pengadaan di mana masih dalam proses tindak lanjut dari LKPP.

III.B. CAPAIAN SDG'S

Tabel 3. 2. CAPAIAN SDG'S

No	Indikator Tingkat Kota	Elemen Data	Satuan	2021	2022	Keterangan
1	IKM Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B	%	100	100	Berdasarkan LHE RB Kota Surakarta tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PermenPANRB diperoleh bahwa nilai indeks RB Kota Surakarta adalah 70,78, sehingga meningkat dari semula B pada tahun 2021 menjadi BB pada tahun 2022. Dengan demikian Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B adalah 100%. Capaian ini sama dengan





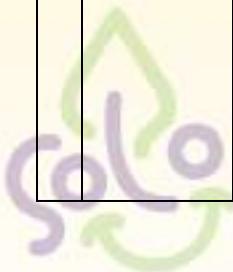
No	Indikator Tingkat Kota	Elemen Data	Satuan	2021	2022	Keterangan
						hasil capaian tahun 2021.
		Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	%	2,54	7,86	Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I dan II tahun 2022, terdapat 77.949 responden. Pada Semester I sebanyak 31.994 orang responden dan Semester II sebanyak 45.955 orang responden dengan hasil SKM rata-rata kategori baik (B) yaitu IKM=87,47 Jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan data Dispendukcapil pada semester II = 583.961, sehingga diperoleh angka $(45.955/583.961) \times 100\%=7,86\%$ *update capaian berdasarkan DKB semester II dari Disadmindukcapil (7,93 adalah hasil berdasarkan DKB smt I 579.212)



No	Indikator Tingkat Kota	Elemen Data	Satuan	2021	2022	Keterangan
		Jumlah fasilitas publik yang diterapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	buah	0		bukan kewenangan, kewenangan tapem terkait standar pelayanan minimal
		Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	%	3	100	Program Bahu Gakin pada tahun 2022 menerima ajuan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Warga katagori Miskin Kota Surakarta masih sebatas pada litigasi. Sebanyak 16 kasus diajukan dan dapat ditangani oleh 3 OBH dari 5 OBH yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta dengan hasil 100% selesai



No	Indikator Tingkat Kota	Elemen Data	Satuan	2021	2022	Keterangan
		Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negaranegara berkembang di Organisasi Internasional	%		50	Pemerintah Kota Surakarta tergabung dalam organisasi internasional pada UCLG Aspac dan OWHC. Hak pengambilan keputusan pada UCLG Aspac, sedangkan pada OWHC AP sebagai anggota pengamat (observer)
2	Jumlah keanggotaan Kota dalam forum dan organisasi internasional	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.	organisasi	0	2	Kota Surakarta ikut serta dalam keanggotaan OWHC (Organization of World Heritage Cities) dan UCLG ASPAC (United Cities and Local Government Asia Pacific)



III.C. CAPAIAN SIPD

Tabel 3. 3. CAPAIAN SIPD

NO	CAPAIAN INDIKATOR	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
1	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan an masyarakat	-	3,005,6 67,650	2,110,1 17,454	Berdasarkan Data Swadaya Masyarakat yang dihimpun dari 5 Kecamatan di Kota Surakarta, jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar Rp.2.110.117.454,00 (Dua Miliar Seratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan an masyarakat (LPM)	-	54	54	Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Surakarta Masa Bakti 2021-2024 jumlah



NO	CAPAIAN INDIKATOR	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
					kelurahan binaan LPMK sejumlah 54
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	100%	2	Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang menjadi binaan PKK Kota Surakarta yaitu sebanyak 122 kelompok. Jumlah Kelurahan di Kota Surakarta sebanyak 54. Rata-rata jumlah kelompok binaan per kelurahan yaitu sebanyak 2 kelompok.
4	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	-	1:506	1 : 506	Jumlah tempat ibadah Kota Surakarta tahun 2021 dan 2022 berdasarkan hasil update data dari Bagian Kesejahteraan Rakyat sebanyak 1.143, terdiri dari 704 masjid, 183 mushola, 237 gereja kristen, 6 gereja katolik, 4 vihara, 3 pura, dan 2 klenteng yang tersebar di 54 kelurahan di Kota



NO	CAPAIAN INDIKATOR	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
					Surakarta. Jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan data BPS tahun 2021 sebanyak 522.768. Dari data tersebut diperoleh rasio tempat ibadah per satuan penduduk Kota Surakarta yaitu 1 : 506
5	Luas wilayah administrasi	m2	-	46,724,000	Luas Wilayah Kota Surakarta adalah 46,724 km2 atau 46724000 m2 dibuktikan pada dokumen Kode Data dan Administrasi Wilayah Kota Surakarta
6	Jumlah kebijakan (Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas	peraturan	0	18	dari 83 Peraturan Walikota yang ditetapkan pada Tahun 2022 terdapat 18 yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk





NO	CAPAIAN INDIKATOR	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
	penduduk				
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	peraturan	0	6	dari 12 Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2022 terdapat 6 peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk yaitu : Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengarusutamaan Gender; Pengelolaan Sampah; Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Pengelolaan Sistem Drainase; dan Penyelenggaraan Perhubungan
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	org	85.5	87.45	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 dari 83,88 menjadi 87,45 dengan kategori B (Baik).
9	Cakupan	unit	-	51	Dari 54 Kelurahan di



NO	CAPAIAN INDIKATOR	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
	sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				Kota Surakarta, terdapat 3 kelurahan dengan kondisi sarana prasarana kantor kurang memadai, diantaranya : Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Mojo dan Kelurahan Banjarsari
10	Batas wilayah administrasi	Lokasi	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo	Utara: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar, Timur: Kabupaten Karanganyar, Selatan: Kabupaten Sukoharjo,	Batas wilayah Kota Surakarta, antara lain: a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, diatur melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah; b. Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, diatur melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Karanganyar dengan



NO	CAPAIAN INDIKATOR	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
				Barat: Kabupaten Karanganyar	Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah; dan c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo diatur melalui Permendagri Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
11	Persentase PKK aktif	%	100	100	
12	Persentase LPM Berprestasi	%	DP3AP 2KB	2	Terdapat 2 (dua) LPMK Berprestasi, diantaranya: 1. LPMK Jebres atas kesertaan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2022 sampai dengan tingkat Nasional/Regional Jawa-Bali dan memperoleh Juara I 2. LPMK Karangasem atas kesertaan dalam Lomba Hemat Energi sampai dengan tingkat Nasional



NO	CAPAIAN INDIKATOR	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
13	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	%	98.32	98.78	Capaian Penerapan SPM Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2022 sesuai hasil pelaporan melalui aplikasi https://spm.bangda.kemendagri.go.id/ sebesar 98.78%, terdiri dari: Pendidikan 96,38% Kesehatan 99,99% Pekerjaan Umum 96,86% Perumahan Rakyat 100% Trantibumlinmas 99,47% Sosial 100% Capaian tersebut diperoleh dari penghitungan indeks pencapaian SPM berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021.
14	Jumlah Desa yang Telah memiliki batas wilayah Administrasi desa sesuai	desa	-	54	Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan penegasan dan penetapan batas kecamatan dan kelurahan melalui Keputusan Walikota



NO	CAPAIAN INDIKATOR	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
	ketentuanPermendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota				Surakarta Nomor 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surakarta
15	Luas Daerah	km2	-	46.72	Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 km ² , ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041. Luas wilayah tersebut sebagaimana



NO	CAPAIAN INDIKATOR	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
					hasil pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK tanggal 27 Agustus 2020 hal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah.
16	Jumlah Jemaah Haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah	org	-	270	Pada tahun 2022, jumlah jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah dari Kota Surakarta sebanyak 270 orang yang terbagi dalam 2 kloter, yaitu kloter 41 dan kloter 42.





III.D. CAPAIAN LPPD OUTCOME

Tabel 3. 4. CAPAIAN LPPD OUTCOME

NO	CAPAIAN INDIKATOR	ELEMEN DATA LPPD OUTCOME	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	24	32	Dari 35 Organisasi Perangkat Daerah di Surakarta, 32 diantaranya sudah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.
		Jumlah OPD	OPD	35	35	Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021, Kota Surakarta terdiri dari 35 Organisasi Perangkat Daerah.
3	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada	-	-	90	Data nilai kontrak tahun 2021 belum terdokumentasi, sedangkan nilai kontrak di tahun 2022 terdapat kontrak sebanyak 90 untuk sektor infrastruktur yang terdiri dari pekerjaan



NO	CAPAIAN INDIKATOR	ELEMEN DATA LPPD OUTCOME	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
	pertama	kuartal pertama tahun n				bangunan, gedung, jalan, dan lainnya.
		Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	-	2,997	5294	Jumlah kontrak keseluruhan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 2.297 kontrak dikarenakan adanya pendokumentasian yang dilakukan melalui sistem LPSE, baik pencatatan dan transaksional yang dilakukan dengan metode selain tender.
4	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	pkt	193	4010	Pada tahun 2021, pencatatan hanya berdasarkan data tender dikarenakan sistem yang belum bisa mengakomodasi metode yang lain,



NO	CAPAIAN INDIKATOR	ELEMEN DATA LPPD OUTCOME	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
						sedangkan pada tahun 2022 aplikasi eprocinfo sudah bisa melakukan penarikan data pengadaan secara keseluruhan, baik itu tender, seleksi, pengadaan langsung transaksional, dan e-purchasing.
		Jumlah keseluruhan pengadaan baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif	-	2,997	8213	Pada tahun 2021, pencatatan hanya berdasarkan data tender dikarenakan sistem yang belum bisa mengakomodasi metode yang lain, sedangkan pada tahun 2022 aplikasi eprocinfo sudah bisa melakukan penarikan data pengadaan secara keseluruhan, baik itu tender, seleksi, pengadaan



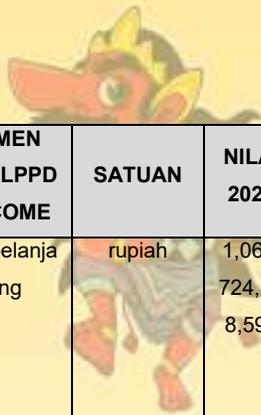
NO	CAPAIAN INDIKATOR	ELEMEN DATA LPPD OUTCOME	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
						langsung transaksional, dan e-purchasing.
5	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	rupiah	342,50 4,969, 411	678,39 8,698, 756	Jumlah nilai pengadaan di tahun 2021 sangat rendah dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi jumlah belanja dan pengadaan, sedangkan pada tahun 2022 anggaran sudah kembali normal karena situasi ekonomi dan pandemi yang sudah berangsur membaik.



The Spirit of Java



BERAKHLAK MELAKUKAN TRANSAKSI DAN BERKORPORASI MELALUI LPPD YANG BERTANGGUNG



NO	CAPAIAN INDIKATOR	ELEMEN DATA LPPD OUTCOME	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
		Total belanja langsung	rupiah	1,060,724,928,594	1,988,669,824,846	Jumlah nilai pengadaan di tahun 2021 sangat rendah dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi jumlah belanja dan pengadaan, sedangkan pada tahun 2022 anggaran sudah kembali normal karena situasi ekonomi dan pandemi yang sudah berangsur membaik.
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan	angka	68,179,000,000	532,457,000,000	Jumlah nilai pengadaan di tahun 2021 sangat rendah dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi jumlah belanja dan



NO	CAPAIAN INDIKATOR	ELEMEN DATA LPPD OUTCOME	SATUAN	NILAI 2021	NILAI 2022	NARASI
	Tahun (n)	Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun (n-1)				pengadaan, sedangkan pada tahun 2022 anggaran sudah kembali normal karena situasi ekonomi dan pandemi yang sudah berangsur membaik.





BAB IV

DATA CAPAIAN PER BAGIAN DI SEKRETARIAT DAERAH

IV.A. BAGIAN UMUM

Bagian Umum merupakan salah satu bagian di Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik pada sekretariat daerah serta fasilitasi perlengkapan pada pimpinan daerah dan sekretariat daerah.

Salah satu tugas Bagian Umum adalah mengelola aset berupa gedung-gedung di area Balaikota Surakarta baik pemeliharannya maupun peminjamannya serta aset berupa kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah. Adapun gedung-gedung yang menjadi tanggungjawab Bagian Umum di area Balaikota Surakarta digambarkan pada gambar dibawah ini :



The Spirit of Java





Gambar 4. 1 Denah Komplek Balaikota

Berikut beberapa capaian Bagian Umum Setda Kota Surakarta di tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya :

A.1. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

Realisasi anggaran Tahun 2022 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dari 9 Bagian di Sekretariat Daerah d tampilkan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 4. 1 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
	SEBELUM	SETELAH		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	59,481,373,338.85	66,606,424,341.15	61,308,247,824.00	5,298,176,517.15
SEKRETARIAT DAERAH	59,481,373,338.85	66,606,424,341.15	61,308,247,824.00	5,298,176,517.15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3,868,033,806.35	50,570,650,844.15	47,098,801,220.00	3,471,849,624.15
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,890,095.00	52,987,345.00	42,042,500.00	10,944,845.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,957,345.00	38,957,345.00	29,252,500.00	9,704,845.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,932,750.00	14,030,000.00	12,790,000.00	1,240,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,415,227,291.00	20,422,038,272.00	19,739,176,599.00	682,861,673.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,356,158,541.00	20,360,969,522.00	19,680,882,149.00	680,087,373.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59,068,750.00	61,068,750.00	58,294,450.00	2,774,300.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	555,318,450.00	469,234,600.00	374,562,625.00	94,671,975.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	216,218,750.00	138,513,750.00	134,644,725.00	3,869,025.00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	277,704,700.00	310,704,600.00	239,917,900.00	70,786,700.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	61,395,000.00	20,016,250.00	17,984,000.00	2,032,250.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,228,011,402.85	4,451,438,102.40	4,037,829,471.00	413,608,631.40

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL	SISA
			REALISASI	ANGGARAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91,466,704.00	138,913,060.00	136,251,300.00	2,661,760.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	970,066,957.00	1,064,091,327.40	880,155,685.00	183,935,642.40
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150,000,000.00	150,000,000.00	145,381,000.00	4,619,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,145,755,011.60	1,227,353,963.00	1,105,535,813.00	121,818,150.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	380,134,887.25	390,020,100.00	370,961,900.00	19,058,200.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,460,000.00	14,960,000.00	10,804,023.00	4,155,977.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,350,445,343.00	1,466,099,652.00	1,388,739,750.00	77,359,902.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	124,682,500.00	0.00	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	714,267,755.00	648,272,800.00	619,471,200.00	28,801,600.00
Pengadaan Mebel	370,720,500.00	182,718,500.00	164,280,700.00	18,437,800.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153,547,255.00	261,804,300.00	252,352,500.00	9,451,800.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	203,750,000.00	202,838,000.00	912,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190,000,000.00	0.00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,640,068,365.75	8,872,131,364.75	8,459,700,129.00	412,431,235.75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43,787,000.00	47,256,880.00	42,496,960.00	4,759,920.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,312,333,455.00	3,428,496,400.00	3,310,706,216.00	117,790,184.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171,786,968.75	231,878,168.75	193,935,024.00	37,943,144.75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,112,160,942.00	5,164,499,916.00	4,912,561,929.00	251,937,987.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,054,295,500.00	5,271,528,740.00	5,090,494,970.00	181,033,770.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	902,120,000.00	1,396,086,300.00	1,334,886,286.00	61,200,014.00
Pemeliharaan Mebel	67,372,500.00	111,835,000.00	111,354,500.00	480,500.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,616,450,500.00	2,895,172,940.00	2,799,468,400.00	95,704,540.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	447,912,500.00	852,137,500.00	833,585,784.00	18,551,716.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,440,000.00	16,297,000.00	11,200,000.00	5,097,000.00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	794,081,000.00	995,769,100.00	848,733,744.00	147,035,356.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	794,081,000.00	873,489,100.00	773,367,784.00	100,121,316.00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	77,280,000.00	75,365,960.00	1,914,040.00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
Daerah				
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	200,000,000.00	2,721,123,498.50	2,288,212,209.00	432,911,289.50
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100,000,000.00	436,902,000.00	338,496,446.00	98,405,554.00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100,000,000.00	326,110,000.00	234,724,770.00	91,385,230.00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	1,958,111,498.50	1,714,990,993.00	243,120,505.50
Penataan Organisasi	2,691,533,282.00	2,618,783,282.00	2,346,539,005.00	272,244,277.00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	624,726,944.00	627,226,944.00	576,516,650.00	50,710,294.00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	461,670,000.00	393,870,000.00	390,599,790.00	3,270,210.00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	350,945,188.00	348,645,188.00	272,376,079.00	76,269,109.00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	590,227,300.00	586,027,300.00	535,010,850.00	51,016,450.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	663,963,850.00	663,013,850.00	572,035,636.00	90,978,214.00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,534,340,664.75	4,047,343,739.50	3,252,038,768.00	795,304,971.50
Fasilitasi Keprotokolan	633,193,032.25	1,036,906,107.00	785,342,750.00	251,563,357.00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,223,608,132.50	1,447,898,132.50	1,184,754,080.00	263,144,052.50
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	677,539,500.00	1,562,539,500.00	1,281,941,938.00	280,597,562.00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11,251,481,697.50	11,470,417,420.00	9,899,281,254.00	1,571,136,166.00
Administrasi Tata Pemerintahan	1,145,631,978.50	1,452,683,851.00	1,097,530,306.00	355,153,545.00
Penataan Administrasi Pemerintahan	167,654,015.00	92,654,015.00	84,592,275.00	8,061,740.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL	SISA
			REALISASI	ANGGARAN
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	380,247,500.00	774,465,600.00	613,688,530.00	160,777,070.00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	597,730,463.50	585,564,236.00	399,249,501.00	186,314,735.00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5,391,943,020.00	6,163,626,370.00	5,936,756,476.00	226,869,894.00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4,324,045,020.00	4,011,723,520.00	3,846,447,726.00	165,275,794.00
Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	999,238,000.00	2,085,432,850.00	2,026,619,150.00	58,813,700.00
Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	68,660,000.00	66,470,000.00	63,689,600.00	2,780,400.00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3,576,065,199.00	3,270,017,199.00	2,440,662,311.00	829,354,888.00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	403,291,000.00	403,291,000.00	261,902,460.00	141,388,540.00
Fasilitasi Bantuan Hukum	2,346,465,000.00	2,079,909,000.00	1,537,846,000.00	542,063,000.00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	826,309,199.00	786,817,199.00	640,913,851.00	145,903,348.00
Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,137,841,500.00	584,090,000.00	424,332,161.00	159,757,839.00
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	399,746,500.00	242,470,000.00	218,788,875.00	23,681,125.00
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	615,145,000.00	236,480,000.00	106,998,936.00	129,481,064.00
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	122,950,000.00	105,140,000.00	98,544,350.00	6,595,650.00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4,361,857,835.00	4,565,356,077.00	4,292,181,350.00	273,174,727.00
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	470,631,445.20	3,185,048,905.00	3,053,906,270.00	131,142,635.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	117,159,633.80	221,312,000.00	201,567,250.00	19,744,750.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN
dan BLUD				
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	36,976,375.00	2,619,500,000.00	2,559,700,100.00	59,799,900.00
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	316,495,436.40	344,236,905.00	292,638,920.00	51,597,985.00
Administrasi Pembangunan	477,561,632.50	472,334,931.00	440,286,770.00	32,048,161.00
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	101,439,952.50	102,929,376.00	99,408,400.00	3,520,976.00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	293,871,680.00	287,198,355.00	261,475,870.00	25,722,485.00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	82,250,000.00	82,207,200.00	79,402,500.00	2,804,700.00
Pengadaan Barang dan Jasa	554,625,255.40	633,631,330.00	566,684,200.00	66,947,130.00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	191,166,467.70	193,492,830.00	161,413,900.00	32,078,930.00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	110,752,049.50	162,676,350.00	151,036,150.00	11,640,200.00
	252,706,738.20	277,462,150.00	254,234,150.00	23,228,000.00
Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	2,859,039,501.90	274,340,911.00	231,304,110.00	43,036,801.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2,783,676,800.00	245,930,511.00	207,441,110.00	38,489,401.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	75,362,701.90	28,410,400.00	23,863,000.00	4,547,400.00
TOTAL	59,481,373,338.85	66,606,424,341.15	61,308,247,824.00	5,298,176,517.15

Dari tabel realisasi anggaran Setda Kota Surakarta diatas dapat diketahui bahwa Setda mendapatkan total anggaran setelah perubahan sebanyak Rp 66,606,424,341.15 dan telah teralisasi sebesar Rp 61,308,247,824.00. Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi penyerapan anggaran mencapai 92,04%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, terdapat selisih 0,23%. Dari perbandingan Pagu Anggaran tahun 2021 dan 2022 terdapat kenaikan 14.654.517.196,61 (28,20%). Berikut tabel perbandingan realisasi anggaran Setda tahun 2021 dan 2022 :

Tabel 4. 2 Perbandingan Capaian Anggaran TA 2021 dan TA 2022

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2021	51,951,907,144.54	47,940,792,532.00	92.27
2022	66,606,424,341.15	61,308,247,824.00	92.04
Selisih			0.23

A.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Salah satu kegiatan yang diampu oleh Bagian Umum Setda Kota Surakarta adalah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator dari sub kegiatan tersebut adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan



dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Pada tahun 2022, Bagian Umum Setda Kota Surakarta mengelola sejumlah 116 (seratus enambelas) unit kendaraan yang terdiri dari 39 unit kendaraan roda empat dan 77 unit kendaraan roda dua. Berikut rekapitulasi pemeliharaan kendaraan dinas (pajak dan service) yang dikelola oleh Bagian Umum Setda Kota Surakarta.

Tabel 4. 3 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Bulan	Pajak (Unit)		Service(Unit)	
		2021	2022	2021	2022
1	Januari	2	2	15	11
2	Februari	-	-	10	15
3	Maret	2	2	8	10
4	April	2	2	8	6
5	Mei	3	3	13	8
6	Juni	10	10	15	6
7	Juli	4	4	9	12
8	Agustus	5	5	5	12
9	September	14	14	9	15
10	Oktober	28	28	4	8
11	November	28	28	11	6
12	Desember	18	18	9	7
	Jumlah	116	116	116	116

Tabel di atas menunjukkan jumlah layanan pajak dan service kendaraan yang dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 untuk setiap bulan. Pada tahun

2021 dan 2022, service selalu dilakukan di setiap bulannya, sedangkan untuk layanan pajak, pada bulan Februari 2021 dan 2022 tidak terdapat kendaraan yang wajib dibayar pajaknya.

Berdasarkan tabel diatas, bulan Oktober pada kedua tahunnya merupakan bulan dengan jumlah layanan pajak terbanyak yaitu 28 unit, sementara itu bulan Juni 2021 merupakan bulan dengan jumlah service terbanyak yaitu 15 unit. Secara keseluruhan, total jumlah layanan pajak dan service pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 116 unit.

A.3. Peminjaman Gedung /Ruang rapat

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan gedung di area Balaikota, Bagian Umum juga memfasilitasi peminjaman gedung dan atau ruang rapat yang menjadi salah satu layanan publik yang dilakukan oleh Bagian Umum. Adapun Gedung atau ruang rapat yang dikelola oleh Bagian Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Gedung dan Ruang Rapat yang dikelola Bagian Umum

No	Nama Gedung/ruang rapat	Kapasitas
1	Pendhapi Gedhe Sala	1000 orang
2	Manganti Praja	60 orang
3	Tawangarum	200 orang
4	Ruang Rapat Gedung DKK Lantai 3 sisi selatan	35 orang
5	Ruang Rapat Gedung DKK Lantai 3 sisi utara	150 orang
6	Tawang Praja	100 orang

Peminjaman Gedung/ruang rapat baik untuk acara kedinasan maupun masyarakat umum dilayani sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedure (SOP) yang telah ditetapkan. Jumlah peminjaman ruang rapat meningkat 16,5% dari tahun 2021 sebanyak 523 menjadi 609 di tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan sudah tidak adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena covid 19. Untuk peningkatan pelayanan publik khususnya peminjaman gedung/ruang rapat, Bagian Umum melakukan pemeliharaan secara berkala serta melaksanakan pengadaan sarana prasarana pelengkap ruang pertemuan. Pada tahun 2022, Bagian Umum melaksanakan Pengadaan Videotron dan Sound System Ruang Rapat Gedung DKK.



Gambar 4. 2 Ruang Rapat Gedung DKK Lantai 3 sisi selatan



Gambar 4. 3 Ruang Rapat Bale Tawangarum

Berikut data peminjaman Gedung/ruang rapat yang dikelola oleh Bagian Umum :



The Spirit of Java



Tabel 4. 5 Jumlah Pemakaian Gedung dan Ruang Rapat

Bulan	2021						2022					
	Pendhapi Gedhe	Manganti Praja	Tawang arum	DKK Selatan	DKK Utara	Tawang praja	Pendhapi Gedhe	Manganti Praja	Tawang arum	DKK Selatan	DKK Utara	Tawang praja
Januari	7	9	7	3	5	7	13	9	7	4	7	6
Februari	6	8	6	4	5	6	20	10	6	4	8	8
Maret	11	10	8	6	7	9	14	15	7	5	10	10
April	5	8	5	3	4	6	8	5	6	3	7	5
Mei	3	7	5	2	4	5	11	8	5	2	5	4
Juni	8	9	6	3	5	7	12	15	10	5	7	8
Juli	18	15	8	6	7	9	10	4	5	1	2	6
Agustus	17	11	7	4	5	6	27	6	5	5	7	7
September	9	10	8	5	5	7	15	4	5	5	10	4
Oktober	15	10	9	5	6	8	29	10	8	5	5	7
November	8	9	6	6	5	8	19	17	7	8	9	6
Desember	10	12	7	6	8	9	18	15	6	7	10	6
Jumlah	117	118	82	53	66	87	196	118	77	87	87	77
Total	523						609					

IV.B. BAGIAN ORGANISASI

Bagian Organisasi adalah salah satu bagian di Sekretariat Daerah Kota Surakarta yang melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian Organisasi terdiri atas Subbbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan jabatan fungsional lainnya. Berikut beberapa capaian Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta di tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya:

B.1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

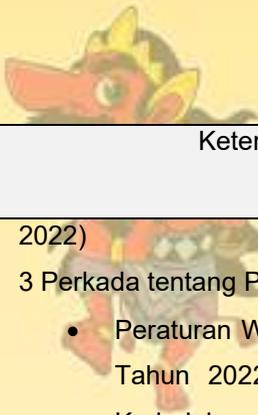
Dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait Kelembagaan dan Analisis Jabatan, beberapa tugas bagian Organisasi diantaranya adalah menyiapkan bahan penyusunan SOTK; koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi; menyusun bahan evaluasi kelembagaan; menyusun dan mengevaluasi peta jabatan; menyusun SKJ; Menyusun analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan; menyusun profil kelembagaan perangkat daerah; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atas sesuai tugas dan fungsinya. Dokumen-dokumen kelembagaan



dan analisis jabatan yang telah disusun oleh Bagian Organisasi kami uraikan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Tahun	Jumlah Dokumen	Keterangan
2021	4	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen penilaian maturitas kelembagaan - 1 Dokumen analisis jabatan - 1 Perkada Tambahan Penghasilan ASN (Peraturan Wali Kota Surakarta no 8 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021) - 1 Perda tentang pembentukan perangkat daerah (Peraturan Daerah No 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah)
2022	8	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen penilaian maturitas kelembagaan - 1 Dokumen analisis jabatan - 1 Dokumen evaluasi jabatan - 1 Dokumen SKJ di Lingkungan Pemkot - 1 Perkada Tambahan Penghasilan ASN (Peraturan Wali Kota Surakarta No 4 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran



Tahun	Jumlah Dokumen	Keterangan
		<p>2022)</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 Perkada tentang Pembentukan UPT<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Wali Kota Surakarta No.15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.• Peraturan Wali Kota Surakarta No.16 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.• Peraturan Wali Kota Surakarta No.16.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan.

B.2. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang diikuti dalam KIPP

Dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah pusat menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal ini, Bagian Organisasi



melaksanakan tugas melakukan fasilitasi pendampingan dalam keikutsertaan inovasi dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Berikut rincian inovasi tersebut:

Tabel 4. 7 Inovasi Perangkat Daerah yang Diikutkan dalam KIPP

Tahun	Jumlah Inovasi	Keterangan
2021	5	<ul style="list-style-type: none"> - Sapu Kuwat-Sila KIA (Pengembangan Si-Rela dan KIA) - E-SIK (Elektronik Sistem Informasi Kesejahteraan) - Solo Great Sale - Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian (Besuk Kiamat) - Taman Anak Cerdas "Papan Sarana, Wasis Bocahe, Waras Ragane Lan Mapan Budi Pekertine"
2022	6	<ul style="list-style-type: none"> - BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta) - E-SIK (Elektronik Sisem Informasi Kesejahteraan) - LAMPU JAWA - RINGKES - SULTANIH CAPINGAN - surakarta satu data

B.3. Jumlah UPP yang melaksanakan SKM

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah survey yang dilakukan untuk memperoleh gambaran secara objektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP). Untuk menunjang pengelolaan SKM, Bagian Organisasi mengembangkan sistem yang bernama **Si jalak koar** (Sistem Kinerja Pelayanan Publik Kota Surakarta). Sijalak Koar merupakan Aplikasi pelayanan publik yang dikembangkan untuk mengintegrasikan data penyusunan Proses Bisnis, SOP seluruh Perangkat Daerah serta memonitoring pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat UPP secara periodik dan sedang dikembangkan untuk Penilaian Mandiri Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah serta pelaporan data Standar Pelayanan (SP).



Gambar 4. 4 Aplikasi Sijalakkoar

UPP yang melaksanakan SKM terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berikut rincian UPP yang telah melaksanakan SKM di tahun 2021 dan 2022:

Tabel 4. 8 UPP yang melaksanakan SKM

Unit Pelayanan Publik	2021	2022
OPD	30	35
UPT	119	125
BUMD	4	4
Jumlah	153	167

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, pada tahun 2021 sebanyak 153 OPD/UPP telah menyampaikan laporannya. Rincian 153 OPD/UPP terdiri dari Perangkat Daerah (PD) sebanyak 30 unit (19,61%); Unit Pelayanan Teknis (UPT) 16 unit (10,46%); Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas sebanyak 17 unit (10,46%); Kecamatan sebanyak 5 unit (3,27%); Kelurahan sebanyak 54 (35,29%); BUMD sebanyak 4 unit (2,61%); dan SMP Negeri sebanyak 27 unit (17,65%). Selanjutnya jumlah UPP yang melaksanakan SKM pada tahun 2022 bertambah menjadi 167 UPP dengan rincian Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 35 unit (20,96%); UPT puskesmas, SMP Negeri, Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 128 unit (76,65%); dan BUMD sebanyak 4 unit (2,40%).



B.4. Jumlah Dokumen PK dan LKjIP

Bagian Organisasi melalui Sub bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021 dan 2022, terdapat 35 perangkat daerah yang dilayani dalam penyusunan PK dan LKjIP. Dalam penyusunan PK, selama tahun 2021 dan 2022 terdapat 2 (dua) PK yang disusun, yaitu Perjanjian Kinerja awal sejumlah 35 Dokumen dan Perjanjian Kinerja Perubahan sejumlah 35 Dokumen. Selain melakukan koordinasi penyusunan PK Perangkat daerah, Bagian Organisasi juga menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Kota sebanyak 2 dokumen. Sehingga total dokumen perjanjian kinerja yang terkompilasi ada 72 dokumen di tahun 2021 dan 2022.

Selain perjanjian kinerja, instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas anggaran yang diampu. Bagian Organisasi bertugas melakukan koordinasi atas penyusunan LKjIP perangkat daerah dan Pemerintah Kota. Secara total ada 36 dokumen di tahun 2021 dan 2022. Rinciannya adalah 35 dokumen LKjIP perangkat daerah dan menyusun 1 dokumen LKjIP Pemerintah Kota.



Tabel 4. 9 Jumlah Dokumen PK dan LKjIP

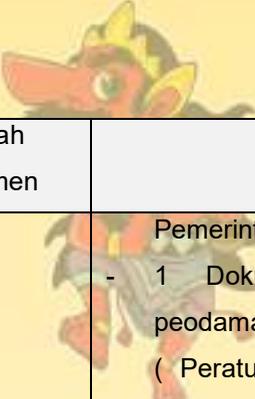
Jenis Dokumen	2021		2022	
	Perangkat Daerah	Kota	Perangkat Daerah	Kota
PK	35	1	35	1
PK Perubahan	35	1	35	1
LKjIP	35	1	35	1

B.5. Jumlah Dokumen Fasilitas PMPRB

Dalam upaya meningkatkan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, bagian organisasi melaksanakan tugas fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk level perangkat daerah dan level kota. Berikut rincian dokumen RB yang telah tersusun.

Tabel 4. 10 Jumlah Dokumen Fasilitas PMPRB

Tahun	Jumlah Dokumen	Keterangan
2021	37	<ul style="list-style-type: none"> - 36 Dokumen hasil PMPRB perangkat daerah dan kota - 1 Perwali Roadmap RB (Peraturan Wali Kota No 35.1 Tahun 2021 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026)
2022	38	<ul style="list-style-type: none"> - 36 dokumen hasil PMPRB perangkat daerah dan kota - 1 dokumen <i>road map</i> RB



Tahun	Jumlah Dokumen	Keterangan
		Pemerintah Kota - 1 Dokumen Perkada tentang pedoman penerapan budaya kerja (Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Budaya Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta)

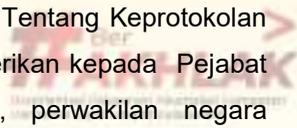
IV.C. BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN

Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan merupakan salah satu bagian di Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, komunikasi dan dokumentasi, serta protokol dan rumah tangga pimpinan daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli).

Beberapa kegiatan yang diampu oleh Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan diantaranya adalah memberikan fasilitasi keprotokolan Pimpinan Daerah, pembuatan konsep sambutan Walikota dan layanan persuratan Pimpinan dengan capaian sebagai berikut :

C.1. Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan bahwa layanan keprotokolan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara



asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. Berikut jumlah fasilitasi keprotokolan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi pimpinan.

Tabel 4. 11 Layanan Keprotokolan Pimpinan Daerah

No	Bulan	Layanan Keprotokolan	
		2021	2022
1	Januari	123	139
2	Februari	177	201
3	Maret	142	163
4	April	158	177
5	Mei	151	152
6	Juni	149	188
7	Juli	121	145
8	Agustus	179	195
9	September	135	154
10	Oktober	165	186
11	November	127	151
12	Desember	173	189
	Jumlah	1800	2040

Capaian layanan keprotokolan lebih banyak dipengaruhi adanya faktor-faktor eksternal Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan, sebagai contoh adalah adanya pandemi covid-19. Dengan adanya pembatasan-pembatasan maka



kegiatan-kegiatan menjadi berkurang dan layanan keprotokolan pun juga menjadi berkurang. Sebaliknya dengan banyaknya kegiatan OPD maupun Instansi lainnya atau banyaknya tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kota Surakarta maka layanan keprotokolan juga semakin bertambah.

C.2. Jumlah Sambutan yang diterbitkan

Salah satu tugas Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan adalah mempublikasikan / mengkomunikasikan kebijakan ataupun hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat diantaranya melalui sambutan Pimpinan Daerah. Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan menyiapkan konsep sambutan Pimpinan Daerah yang akan dibacakan dalam acara-acara resmi yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah. Adapun capaian jumlah sambutan yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Sambutan yang diterbitkan

No	Bulan	Jumlah Sambutan yang diterbitkan	
		2021	2022
1	Januari	16	15
2	Februari	13	23
3	Maret	51	27
4	April	33	17
5	Mei	10	31
6	Juni	29	38



No	Bulan	Jumlah Sambutan yang diterbitkan	
		2021	2022
7	Juli	4	43
8	Agustus	10	56
9	September	17	42
10	Oktober	26	63
11	November	28	44
12	Desember	14	38
	Jumlah	251	437

Berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 186 sambutan atau sebanyak 74%. Capaian layanan penerbitan sambutan juga banyak dipengaruhi adanya faktor-faktor eksternal dari Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan. Semakin banyak kegiatan OPD dan masyarakat yang mengundang Pimpinan Daerah maka akan semakin banyak pula sambutan yang diterbitkan, demikian juga sebaliknya.

C.3. Layanan Persuratan Pimpinan

Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan juga memberikan layanan tata usaha / persuratan Pimpinan. Adapun capaian layanan persuratan pimpinan adalah sebagai berikut:

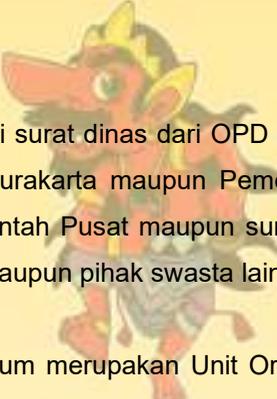


Tabel 4. 13 Layanan Persuratan Pimpinan

No	Bulan	Jumlah Layanan Persuratan	
		2021	2022
1	Januari	1.200	1.203
2	Februari	1.172	1.309
3	Maret	1.669	1.495
4	April	1.425	2.721
5	Mei	1.194	989
6	Juni	1.466	1.357
7	Juli	1.086	1.295
8	Agustus	1.218	1.530
9	September	1.416	1.416
10	Oktober	1.459	1.489
11	November	1.602	1.428
12	Desember	1.331	1.482
	Jumlah	16.238	17.714

Berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 1476 surat masuk atau sebanyak 9%. Kenaikan ataupun penurunan layanan persuratan yang diberikan oleh Bagian Protokol, Komunikas dan Administrasi Pimpinan dipengaruhi oleh OPD, masyarakat ataupun kegiatan Pimpinan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan layanan persuratan yang dikelola oleh Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan merupakan surat yang ditujukan kepada Pimpinan yang dalam hal ini adalah Sekda, Wakil Walikota dan Walikota yang





meliputi surat dinas dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta maupun Pemerintah Daerah lain serta Pemerintah Pusat maupun surat-surat dari masyarakat, LSM ataupun pihak swasta lainnya.

IV.D. BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum merupakan Unit Organisasi Pemerintah Non Struktural yang bersifat permanen, serta sebagai salah satu dari sembilan Bagian di Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat, Bagian Hukum yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Dalam aplikasinya, Bagian Hukum menjalankan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang memiliki sasaran terwujudnya kepastian hukum. Untuk sub kegiatan, Bagian Hukum menjalankan Fasilitasi Penyusunan produk hukum; Fasilitasi Bantuan Hukum; Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Berikut capaian Bagian Hukum di tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya:

D.1. Penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Daerah

Salah satu tugas Bagian Hukum adalah fasilitasi penyusunan produk hukum dan peraturan daerah di Kota Surakarta. Dalam melaksanakan tugas ini, Bagian Hukum mengembangkan aplikasi Sistem Monitoring Asman (SiMONAS). SiMONAS diaplikasikan untuk membantu OPD Pemrakarsa dalam mengajukan asman Produk Hukum kepada Walikota maupun Sekda, mulai dari pengajuan dan monitoring hingga proses selesai. Pada pengembangan SiMONAS tahun 2022, memudahkan pengguna dalam memperoleh notifikasi proses selain email ditambah whatsapp dan dapat memfilter penugasan kepada korektor. Sedangkan untuk proyeksi pengembangan di tahun 2023 SiMONAS bisa memfilter durasi waktu proses dan lokasi pertahapan.



Gambar 4. 5 Aplikasi SiMONAS



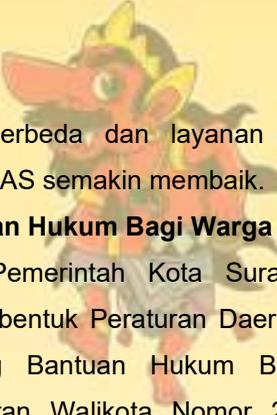
Berikut produk hukum dan peraturan daerah yang telah dihasilkan oleh Bagian Hukum :

Tabel 4. 14 Perbandingan Produk hukum berdasarkan jenis keputusan tahun 2022 2021

Bulan (2022)	Peraturan Daerah (yang diundangkan)	Peraturan Walikota (yang diundangkan)	Keputusan Walikota
Januari	0	13	125
Februari	1	4	22
Maret	0	4	42
April	0	13	28
Mei	1	2	38
Juni	0	6	40
Juli	0	3	44
Agustus	1	7	40
September	2	5	25
Oktober	1	8	34
November	3	4	43
Desember	3	14	21
Jumlah (2022)	12	83	502
Tahun 2021	9	53	351

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kenaikan dalam hal pengajuan serta penetapan produk hukum yang difasilitasi oleh Bagian Hukum dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini dikarena bahwa kebutuhan Perangkat Daerah selaku pemrakarsa akan rumusan kebijakan





juga berbeda dan layanan yang dilakukan melalui SIMONAS semakin membaik.

D.2. Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Pemerintah Kota Surakarta melalui kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin telah melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memiliki permasalahan hukum. Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diberikan dan dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan hasil verifikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah. Adapun OBH yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Yayasan ATMA
- 2) Majelis Hukum, HAM dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta



- 
- 3) Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK HAM)
 - 4) Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM)
 - 5) Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
 - 6) Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang Solo 1997

Sejak dimulainya pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kota Surakarta pada Triwulan IV Tahun 2021, Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta telah membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi warga miskin sebanyak 19 kasus dengan rincian tahun 2021 sebanyak 3 kasus dan tahun 2022 sebanyak 16 Kasus dengan mayoritas kasus adalah kasus perdata dan kesemuanya dilakukan melalui jalur litigasi (peradilan).

D.3. Pendampingan Hukum Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pedampingan Hukum Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan asas Kepastian Hukum dan meningkatkan daya guna dan hasil yang optimal terkait pelaksanaan pembangunan yang dijalankan oleh perangkat daerah tertentu dengan bekerja sama Kejaksaan Negeri. Pada tahun 2022 Bagian Hukum mendampingi sebanyak 11 OPD dengan 27 jenis pembangunan.



Tabel 4. 15 Pendampingan Hukum Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Bagian Hukum

No	Perangkat Daerah	KEGIATAN
1	Dispora	Lanjutan Pembangunan GOR Manahan
2	PDAM	Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
3	DPUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi Penambahan Jaringan Air Minum Wosusokas 2. Pembangunan Saluran Jalan Mr.Sartono dan Drainase Primer 3. Perbaikan Talud Drainase Primer 4. Peningkatan Jalan Kyai Mojo 5. Peningkatan Jalan Kahar Muzakir 6. Peningkatan Jalan Surya 7. Peningkatan Jalan MT Haryono 8. Penataan Koridor Jalan Juanda Tahap 3
4	DPUPR	Penggantian Jembatan Mojo Ruas Jalan Kyai Mojo (No.Ruas 50) Kota Surakarta
5	Dishub	Pembangunan Gedung Parkir Ketandan
6	Kecamatan Banjarsari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Kel. Nusukan) 2. Pembangunan Gedung Serbaguna sebagai Fasilitas Publik (Kel. Banyuanyar)
7	Disbudpar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan TIC dan perlengkapannya TSTJ 2. Penataan Lansekap Taman Satwa Taru Jurug 3. Pembangunan 20 unit Gazebo TSTJ



No	Perangkat Daerah	KEGIATAN
		4. Pembangunan 10 unit Plaza Kuliner TSTJ
8	Disperum KPP	1. Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan HP 0001 Kel. Mojo Tahap II 2. Pembangunan Talud Rusun Putri Cempo
9	Dinas Pendidikan	1. Pembangunan SD Negeri Bayan Surakarta 2. Pembangunan SD Negeri Jagalan Surakarta Tahap II 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4. Pembangunan SMP Negeri 21 Kota Surakarta 5. Pembangunan SD Negeri Joyotakan Kota Surakarta
10	Dinkop UMKM dan Perindustrian	Pembangunan Sentra IKM Mebel Gilingan Surakarta
11	Kecamatan Laweyan	Pembangunan Taman Cerdas Kelurahan Karangasem

D.4. Sosialisasi Peraturan Daerah

Bagian Hukum Setda Kota Surakarta pada Tahun 2022 melaksanakan fungsi penyebarluasan produk peraturan daerah melalui sosialisasi. Adapun bahan sosialisasi adalah Pemahaman secara utuh terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan





Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Peserta Sosialisasi Peraturan Daerah adalah warga kota Surakarta yang diambil dari tokoh masyarakat untuk 5 kecamatan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang selanjutnya menimbulkan kesepahaman dengan harapan besar akan berujung pada kesadaran masyarakat akan hukum

IV.E. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Bagian Tata Pemerintahan adalah salah satu bagian di Sekretariat Daerah Kota Surakarta yang melaksanakan tugas persiapan perumusan kebijakan daerah, persiapan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan; dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas Sub Koordinator Otonomi Daerah, Sub Koordinator Kerja Sama; dan jabatan fungsional lainnya. Berikut capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan, diantaranya:

E.1. Jumlah Naskah Kerjasama yang Terimplementasi (Dalam Negeri dan Luar Negeri)

Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada





pertimbangan, efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan 113 Kesepakatan Bersama yaitu 17 kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah lain, 63 Kesepakatan Bersama dengan pihak ketiga, 27 sinergi pembangunan daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan 6 kerja sama dengan pihak luar negeri. Dari 113 Kesepakatan Bersama tersebut sebanyak 104 Kesepakatan Bersama telah terimplementasi oleh Perangkat Daerah di Kota Surakarta, berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) maupun kegiatan bersama, dengan total sebanyak 130 PKS/kegiatan bersama.

Kerja Sama pada Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Perbandingan jumlah naskah kerjasama Tahun 2021 dan Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:



The Spirit of Java





Tabel 4. 16 Jumlah Naskah Kerjasama yang Terimplementasi

No	Jenis Kerja Sama	2021			2022		
		Jumlah KSB/ Sinergi	Terimplementasi	Jumlah PKS	Jumlah KSB/ Sinergi	Terimplementasi	Jumlah PKS
Dalam Negeri							
1.	Kerja Sama dengan Daerah Lain	8	8	10	17	14	17
2.	Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	40	28	43	63	57	80
3.	Sinergi Pembangunan Daerah	20	20	20	27	27	27
Luar Negeri							
1.	Kerja Sama Dengan Pihak Luar Negeri	6	6	6	6	6	6
	Jumlah	74	62	79	113	104	130

Faktor pendorong pencapaian sasaran strategis tersebut adalah masih banyaknya penawaran kerjasama daerah baik dari pemerintah daerah lain, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, swasta berbadan hukum maupun pihak luar negeri yang masuk ke Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya mendorong kebangkitan aktivitas dan ekonomi masyarakat pasca pandemic COVID-19.



Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada tahun mendatang akan ditempuh strategi yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama untuk mendorong mitra kerjasama dan Perangkat Daerah untuk segera mengimplementasikan kerjasama daerah, mempersyaratkan mitra kerjasama yang akan mengajukan kerjasama agar terlebih dahulu berkomitmen dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan kerjasama dan mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan inisiasi kerjasama daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas daerah. Untuk membantu Sub Koor Kerjasama dalam penyusunan kerjasama dan membantu pihak-pihak yang ingin melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk mengerti dan memahami urutan langkah-langkah dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan kerjasama, Bagian Tata Pemerintahan membangun aplikasi Makan Jadah.



Gambar 4. 6 Aplikasi Makan Jadah

E.2. Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan

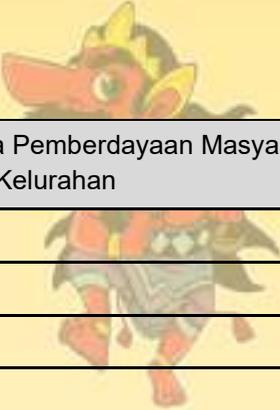
Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) adalah hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 untuk kepentingan masyarakat Kelurahan dipergunakan sebagai Biaya Operasional LPMK dan Biaya Kegiatan Hasil Musrenbangkel.

Pelaksanaan DPK diatur melalui Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 14.1 Tahun 2022 tentang Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2022, sedangkan penerima dan besaran alokasi hibah DPK ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 900/49.2 Tahun 2022 tentang Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2022.

Pada Tahun 2022, total alokasi hibah DPK sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dialokasikan untuk 54 LPMK di Kota Surakarta, dengan masing-masing alokasi hibah sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan Tahun 2022

NO	Penerima Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	ALOKASI
I.	KECAMATAN LAWEYAN	
1.	LPMK Pajang	209.576.000
2.	LPMK Laweyan	132.993.000
3.	LPMK Bumi	95.726.000



NO	Penerima Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	ALOKASI
4.	LPMK Panularan	295.025.000
5.	LPMK Penumping	116.272.000
6.	LPMK Sriwedari	71.256.000
7.	LPMK Purwosari	122.999.000
8.	LPMK Sondakan	116.987.000
9.	LPMK Kerten	94.328.000
10.	LPMK Jajar	131.634.000
11.	LPMK Karangasem	256.440.000
II.	KECAMATAN SERENGAN	
1.	LPMK Joyotakan	74.340.000
2.	LPMK Danukusuman	99.810.000
3.	LPMK Serengan	105.184.000
4.	LPMK Tipes	331.893.000
5.	LPMK Kratonan	121.206.000
6.	LPMK Jayengan	68.932.000
7.	LPMK Kemlayan	67.764.000
III.	KECAMATAN PASAR KLIWON	
1.	LPMK Joyosuran	164.962.000
2.	LPMK Semanggi	530.948.000
3.	LPMK Pasar Kliwon	72.089.000
4.	LPMK Gajahan	68.279.000
5.	LPMK Baluwarti	628.026.000

NO	Penerima Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	ALOKASI
6.	LPMK Kampung Baru	265.054.000
7.	LPMK Kedung Lumbu	199.314.000
8.	LPMK Sangkrah	145.916.000
9.	LPMK Kauman	73.744.000
10.	LPMK Mojo	264.065.000
IV.	KECAMATAN JEBRES	
1.	LPMK Kepatihan Kulon	89.804.000
2.	LPMK Kepatihan Wetan	59.429.000
3.	LPMK Sudiroprajan	102.684.000
4.	LPMK Gandekan	92.974.000
5.	LPMK Sewu	90.440.000
6.	LPMK Pucang Sawit	225.948.000
7.	LPMK Jagalan	137.198.000
8.	LPMK Purwodiningratan	121.207.000
9.	LPMK Tegalarjo	102.781.000
10.	LPMK Jebres	471.072.000
11.	LPMK Mojosongo	460.862.000
V.	KECAMATAN BANJARSARI	
1.	LPMK Kadipiro	231.930.000
2.	LPMK Nusukan	413.348.000
3.	LPMK Gilingan	327.829.000
4.	LPMK Setabelan	113.955.000



NO	Penerima Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	ALOKASI
5.	LPMK Kestalan	80.680.000
6.	LPMK Keprabon	104.390.000
7.	LPMK Timuran	78.955.000
8.	LPMK Ketelan	70.033.000
9.	LPMK Punggawan	78.934.000
10.	LPMK Mangkubumen	269.946.000
11.	LPMK Manahan	251.672.000
12.	LPMK Sumber	330.455.000
13.	LPMK Banyuanyar	164.916.000
14.	LPMK Banjarsari	155.844.000
15.	LPMK Joglo	447.952.000
	JUMLAH	10.000.000.000



The Spirit of Java



Keberhasilan Program Pembangunan Masyarakat
Melihat dari aspek perilaku

Tabel 4. 18 Program bantuan melalui SIPKE-MAS

No	Forum Kesra	Program Bantuan
1	PMI	<ul style="list-style-type: none"> - Griya PMI Bahagia - Griya PMI Peduli - Dompot Kemanusiaan - Penganggulangan Bencana
2	Laziz Jateng Cab Solo	<ul style="list-style-type: none"> - Santunan Pendidikan Yatim - Santunan Gizi Yatim - Santunan Bunda Yatim - Pelatihan Wirausaha Yatim - Bantuan Kesehatan Anak Yatim - Bantuan Sarana Belajar Anak Yatim - Bantuan Paket Internet
3	BAZNAZ	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Ekonomi Produktif - Kesehatan - Dakwah dan Advokasi - Kemanusiaan
4	Perkumpulan Masyarakat Surakarta	Bedah Rumah

Aplikasi SIPKEMAS merupakan aplikasi berbasis website yang dapat diakses melalui <https://sipkemas.surakarta.go.id/>. Berikut tampilan dari SIPKE-MAS :



The Spirit of Java



Supporter (Pegawai) Kabupaten Komputasi Masyarakat Lokal untuk Pembinaan



Gambar 4. 7 Aplikasi SIPKE-MAS

Berikut beberapa capaian Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta di tahun 2022:

F.1. Fasilitas Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan

Salah satu tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah memfasilitasi pemberian bantuan dana hibah keagamaan Pemerintah Kota Surakarta. Berikut ini merupakan data jumlah penerima bantuan dana hibah keagamaan Pemerintah Kota Surakarta yang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat:



The Spirit of Java





Tabel 4. 19 Dana Hibah yang dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Penerima Bantuan Dana Hibah Keagamaan	13 ormas	20 ormas
2	Jumlah Realisasi Dana Hibah Keagamaan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 900.000.000,-	Rp 1.635.000.000,-

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kenaikan yang signifikan baik dari jumlah penerima maupun jumlah realisasi anggaran dana hibah keagamaan yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Kenaikan tersebut karena adanya penambahan tugas pokok dan fungsi di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta yang mengakibatkan pergeseran anggaran urusan pemberdayaan masyarakat yang semula dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melimpah ke Bagian Kesejahteraan Rakyat. Berikut rincian penerima dan besaran dana hibah yang dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat :





Tabel 4. 20 Penerima dan besaran dana hibah

No	Penerima	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surakarta	100.000.000,-	100.000.000,-
2.	BAGKS	50.000.000,-	50.000.000,-
3.	KEVIKEPAN Surakarta	25.000.000,-	25.000.000,-
4.	Parisada Hindu Dharma Surakarta	25.000.000,-	25.000.000,-
5.	Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Surakarta	25.000.000,-	25.000.000,-
6.	Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) Surakarta	15.000.000,-	25.000.000,-
7.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta	200.000.000,-	290.000.000,-





No	Penerima	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
8.	Dewan Musyawarah Daerah Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia	20.000.000,-	25.000.000,-
9.	PC Nahdlatul Ulama	75.000.000,-	0
10.	DPD Muhammadiyah	75.000.000,-	0
11.	Paguyuban Purna Widya Praja	40.000.000,-	0
12	Masjid Agung Surakarta	200.000.000,-	200.000.000,-
13.	Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surakarta	50.000.000,-	50.000.000,-
14.	Masjid Frobel	0	20.000.000,-
15.	Masjid Al Wustho	0	100.000.000,-
16.	Masjid	0	50.000.000,-



No	Penerima	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Baitussalam		
17.	Masjid Shofa	0	50.000.000,-
18.	Gereja Kristen Getsemani Jemaat Filadelfia	0	50.000.000,-
19.	Internasional Full Gospel Fellowship Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI) Jawa Tengah	0	15.000.000,-
20.	PKK Kota Surakarta	0	410.000.000,-
21.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia	0	45.000.000,-
22.	Perkumpulan Gerakan Pentakosta Pembaharuan Solo Raya	0	40.000.000,-
23.	DPC Wanita Katolik Republik	0	40.000.000,-

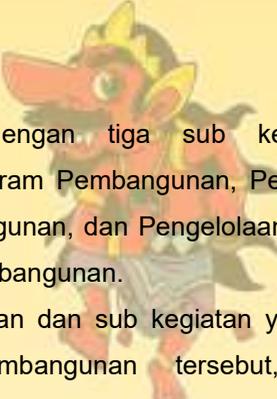


No	Penerima	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Indonesia		
	TOTAL	900.000.000,-	1.635.000.000,-

Pada tahun 2022, Bagian Kesejahteraan Rakyat juga memfasilitasi dana hibah untuk Pondok Pesantren. Total dana hibah untuk Pondok Pesantren sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada 30 Pondok Pesantren di Kota Surakarta. Pondok pesantren yang mendapat adalah pondok pesantren yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Agama. Bagian kesra memfasilitasi dari mulai Proposal, Pengusulan dan Pencairan sampai dengan LPJ Dana Hibah. Bagian Kesra juga melaksanakan monitoring dan evaluasi supaya dalam pelaporan dana hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IV.G. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan salah satu bagian di Sekretariat Daerah dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian program Pembangunan dan evaluasi pelaporan. Berdasarkan uraian tugas tersebut Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Administrasi



Pembangunan dengan tiga sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Atas kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh Bagian Administrasi Pembangunan tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tiga Standar Pelayanan yaitu:

- 1) Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur (SIMONELA)
- 2) Monitoring dan Pengendalian Capaian Realisasi SKPD Pemerintah Kota Surakarta (SIMDALBANGDA)

Pelatihan SIMDALBANGDA

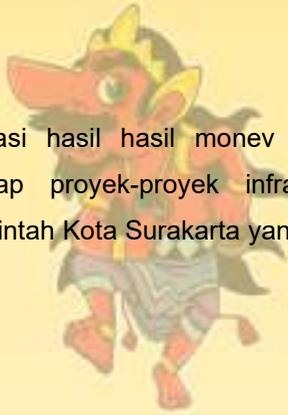
Berikut beberapa capaian Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta di tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Pembangunan daerah:

G.1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Paket Pembangunan Infrastruktur

Sesuai dengan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan setiap bulannya membuat pelaporan terkait dengan hasil koordinasi dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Pembangunan Daerah, maka Bagian Administrasi Pembangunan mengembangkan sebuah sistem bernama **Simonela** (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Lapangan). Simonela merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat atau menampung data dan



informasi hasil hasil monev atau tinjauan lapangan terhadap proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang dilakukan setiap bulan.



The Spirit of Java



Unggahlah perilaku akhlak komputer
setelah login menggunakan password



Laporan Progres Monitoring Semua Bulan TA. 2022
 Semua CPD
 Semua Kemitra
 Semua Kelompok

No.	Nama Kemitra	Jenis Kemitra	CPD	Kelompok	SD/Desa	Anggota Ks	Nilai Kemitra (Rp.)	Kelompok	Rekening SP31 TK	Tgt & Realisasi Terdapat Anggaran	Saldo Awal	Saldo Akhir	Keterangan
1	Kelompok Kemitraan Pengabdian dan Kemandirian Sempoa	Jalan	Ones Pelayan Lintas Desa Perikanan Nelayan	Agromarit 1	12	16	1.676.217.900,00	DI PERANG, LARA-041	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Rekening SP31 TK: 82210170101224 • Rekening Saldo Awal Rp. 0,00 • Pencairan Terdaftar SP31 TK: 20 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik: <ul style="list-style-type: none"> • Target: 1.000,00 • Realisasi: 100,00 • Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Target: 0,00 • Realisasi: 0,00 	0,00		<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi/Realisasi Fisik: 100% (100/100) • Tidak Lunas • Kemitraan: Perencanaan anggaran tidak ada
2	Kelompok Kemitraan Pengabdian dan Kemandirian Sempoa	Desa	Ones Pelayan Lintas Desa Perikanan Nelayan	Agromarit 2	12	16	3.662.047.040,00	DI PERANG, LARA-041	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Rekening SP31 TK: 82200004101220 • Rekening Saldo Awal Rp. 0,00 • Pencairan Terdaftar SP31 TK: 20 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik: <ul style="list-style-type: none"> • Target: 1.000,00 • Realisasi: 100,00 • Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Target: 1.000,00 • Realisasi: 100,00 	0,00		<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi/Realisasi Fisik: 100% • Tidak Lunas • Kemitraan: Perencanaan anggaran tidak ada
3	Kelompok Kemitraan Pengabdian dan Kemandirian Sempoa	Jalan	Ones Pelayan Lintas Desa Perikanan Nelayan	Agromarit 1	12	16	1.592.107.700,00	DI AGUNG, BE-040, JAWA	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Rekening SP31 TK: 8221014000000779 • Rekening Saldo Awal Rp. 0,00 • Pencairan Terdaftar SP31 TK: 20 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik: <ul style="list-style-type: none"> • Target: 1.000,00 • Realisasi: 100,00 • Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Target: 0,00 • Realisasi: 0,00 	0,00		<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi/Realisasi Fisik: 100% (100/100) • Tidak Lunas • Kemitraan: Perencanaan anggaran tidak ada

Gambar 4. 9 Laporan Progres Monitoring Semua Bulan Ta.2022



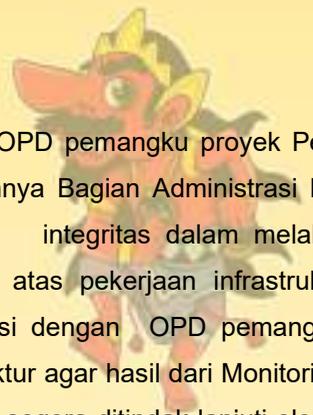
Hasil Rekapitulasi Laporan Monitoring Evaluasi Lapangan Pekerjaan Paket Infrastruktur di Pemerintah Kota Surakarta di Aplikasi Simonela.

Berikut adalah hasil monitoring dan evaluasi paket pembangunan infrastruktur tahun 2021 dan 2022.

Tabel 4. 21 Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

Jenis Obyek Pekerjaan	Jumlah Paket Pekerjaan		Jumlah Paket Pekerjaan Terlambat		Jumlah Paket Pekerjaan Selesai Tepat Waktu		Persentase Pekerjaan Selesai Tepat Waktu	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Jalan	20	35	3	3	17	32	85	91
Jembatan	4	4	2	0	2	4	50	100
Drainase	14	9	1	1	13	8	93	89
Gedung	34	20	1	2	33	18	97	90
Taman	1	4	0	0	1	4	100	100
Lainnya	8	21	0	0	8	21	100	100
Rata-rata							87,5	95

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata persentase pekerjaan selesai tepat waktu meningkat dari 87,5% menjadi 95%. Peningkatan tersebut tidak lepas dari adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas pekerjaan infrastruktur yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan. Kunci sukses dalam proses Monitoring dan Evaluasi tersebut adalah adanya koordinasi yang kuat antara Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Administrasi Pembangunan



dengan OPD pemangku proyek Pembangunan infrastruktur. Kedepannya Bagian Administrasi Pembangunan akan tetap menjaga integritas dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pekerjaan infrastruktur serta tetap menjaga koordinasi dengan OPD pemangku proyek pembangunan infrastruktur agar hasil dari Monitoring dan Evaluasi lapangan ini dapat segera ditindak lanjuti oleh OPD pemangku proyek pembangunan infrastruktur.

G.2. Jumlah Monitoring dan Pengendalian Capaian Realisasi SKPD

Selain melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pekerjaan infrastruktur, Bagian Administrasi Pembangunan juga memiliki fungsi pengendalian dalam memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja dan serapan anggaran OPD atas APBD Pemkot Surakarta. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bagian Administrasi Pembangunan mengembangkan Aplikasi **Simdalbangda**. Simdalbangda telah digunakan sejak tahun 2013 dan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian capaian kinerja dan serapan anggaran OPD atas APBD Pemkot Surakarta. Output dari aplikasi Simdalbangda adalah laporan capaian kinerja dan serapan anggaran OPD atas APBD Pemkot Surakarta. Laporan tersebut diteruskan kepada Pimpinan (Sekretaris Daerah dan Wali Kota) dan merupakan data yang digunakan sebagai materi Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (RAKORPOK) yang diselenggarakan tiap triwulan.



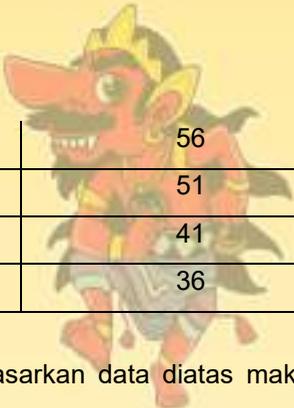


Gambar 4. 10 Aplikasi Simdalbangda

Berikut adalah tabel yang menjelaskan jumlah serapan OPD yang dibawah rerata kota setiap bulannya:

Tabel 4. 22 Serapan OPD dibawah rerata TA 2021 dan TA 2022

Bulan	Jumlah OPD dengan Serapan Dibawah Rerata Kota	
	2021	2022
Januari	107	94
Februari	114	73
Maret	82	67
April	75	57
Mei	63	62
Juni	66	64
Juli	64	61
Agustus	59	51



September	56	52
Oktober	51	48
November	41	40
Desember	36	30

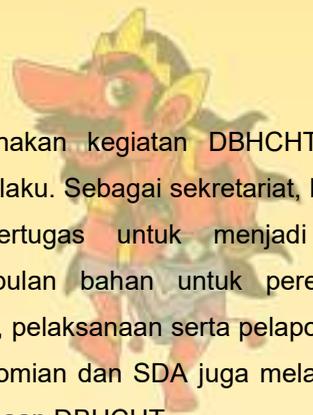
Berdasarkan data diatas maka serapan anggaran OPD atas APBD Pemkot Surakarta semakin meningkat menjelang akhir tahun, dapat dilihat dari jumlah OPD yang serapannya dibawah rerata serapan kota yang semakin sedikit. Hal tersebut dikarenakan adanya fungsi pengendalian yang dilakukan setiap bulan agar OPD dapat melakukan serapan anggaran sesuai dengan target.

IV.H. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, penyiapan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian perekonomian UMKM dan ekonomi kreatif serta sumber daya alam. Berikut capaian kinerja dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam :

H.1. Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCT)

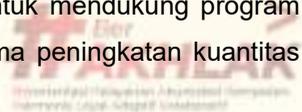
Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Surakarta bertindak sebagai sekretariat DBHCT Kota Surakarta. Bersama dengan BAPPEDA dan BPKAD, Bagian Perekonomian dan SDA memfasilitasi OPD-OPD lain di Kota Surakarta berkoordinasi dengan Sekretariat DBHCT Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dalam

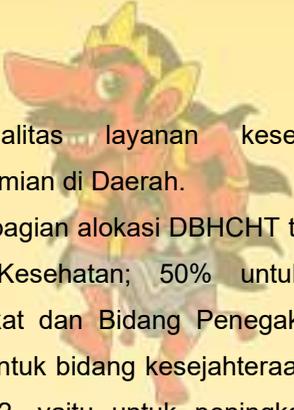


melaksanakan kegiatan DBHCHT berdasarkan Peraturan yang berlaku. Sebagai sekretariat, Bagian Perekonomian dan SDA bertugas untuk menjadi *leading sector* untuk pengumpulan bahan untuk perencanaan anggaran dan kegiatan, pelaksanaan serta pelaporannya. Selain itu, Bagian Perekonomian dan SDA juga melaksanakan sosialisasi atas pelaksanaan DBHCHT.

Sesuai dengan pasal 66A UU No. 39 Tahun 2007, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dilakukan dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.

Penggunaan DBHCHT sesuai PMK No. 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT adalah untuk mendanai: peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas





dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Pembagian alokasi DBHCHT tersebut adalah: 40% untuk Bidang Kesehatan; 50% untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Bidang Penegakan Hukum sebesar 10%. Alokasi untuk bidang kesejahteraan masyarakat dapat dibagi menjadi 2, yaitu untuk peningkatan kualitas bahan baku sebesar 20% dan pembinaan lingkungan sosial (30%).

Selanjutnya di pasal 11 dijelaskan penggunaan DBHCHT ketentuan penganggaran DBHCHT yaitu 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang Kesehatan. Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum dan pemberian bantuan apabila melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah dapat mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 976.05/21.13 Tahun 2022 tentang Sekretariat Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.



The Spirit of Java



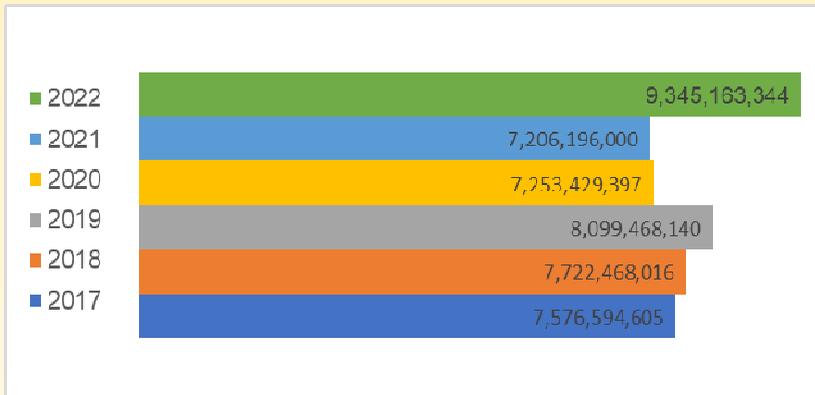
H.2. Pelaksanaan kegiatan DBHCHT Tahun Anggaran 2022 adalah:

Tabel 4. 23 Pelaksanaan Kegiatan DBHCT Kota Surakarta Tahun 2022

No	Bidang/Program	OPD
1	Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
	a. Program Pembinaan Industri	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
	b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1. Dinas Sosial 2. Dinas Tenaga Kerja
2	Bidang Penegakan Hukum	
	a. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Komunika, Informatika, Statistik dan Persandian 3. Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	b. Program Pemberantasan BKC Ilegal	1. Bagian Perekonomian dan SDA 2. Satuan Polisi Pamong Praja
3	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan



Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Surakarta memperoleh alokasi dana Rp. 8.839.451.000. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) DBHCHT Tahun 2020 sebesar Rp 185.784.344 menjadikan pagu anggaran DBHCHT TA 2022 sebesar Rp.9.025.235.344. Alokasi DBHCHT Kota Surakarta dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sebagaimana gambar berikut:



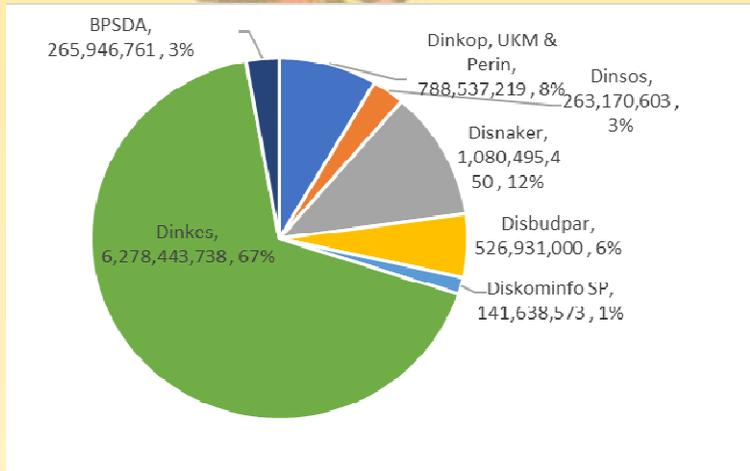
Gambar 4. 11 Alokasi DBHCT Kota Surakarta TA 2017-2022

Adapun pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:



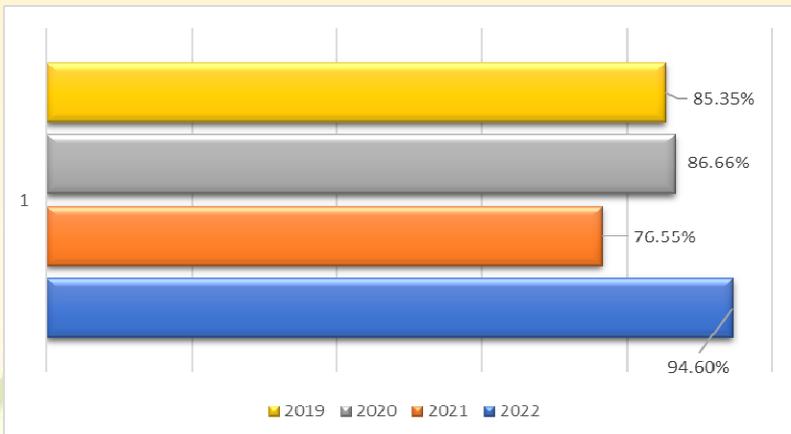
The Spirit of Java



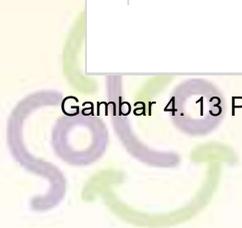


Gambar 4. 12 Proporsi Anggaran DBHCT Kota Surakarta TA 2022

Persentase capaian realisasi anggaran ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 94,6%. Berikut perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Gambar 4. 13 Perbandingan Realisasi Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA TA 2019-2022



H.3. Pembinaan BUMD

Sesuai dengan Perwali No. 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Perekonomian melaksanakan fungsi pembinaan BUMD, antara lain:

- 1) Membuat bahan perumusan kebijakan BUMD, melakukan koordinasi dan fasilitasi BUMD, melakukan fasilitasi administrasi dan koordinasi kegiatan BUMD, serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas BUMD.
- 2) Melaksanakan kebijakan penyertaan modal berpedoman pada aturan yang berlaku.

Pembinaan dan fasilitasi dilakukan terhadap 4 (empat) BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

Tabel 4. 24 BUMD di Kota Surakarta

No	Nama BUMD	Bidang	Dasar Hukum Pendirian
1	Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug	Pariwisata dan Konservasi	Perda No. 15 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug
2	Perusahaan Umum Daerah Bank	Bank Perkreditan Rakyat	Perda No 4 Tahun 2015 tentang



No	Nama BUMD	Bidang	Dasar Hukum Pendirian
	Perkreditan Rakyat Bank Solo		Perubahan atas Perda No.11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo
3	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta	Air Minum	Perda No. 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
4	Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta	Aneka Usaha	Perda No. 12 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Surakarta

Selain itu juga dilaksanakan fasilitasi administrasi kepada BUMD milik Provinsi Jawa Tengah, dimana Pemerintah Kota Surakarta mempunyai *share* dalam kepemilikannya, antara lain PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Jawa Tengah (Perseroda), PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (Perseroda).



H.4. Pembinaan BLUD

Sesuai dengan Perwali Surakarta No. 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 33 – 34 dan pasal 38, Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan administrasi di dibidang BUMD dan BLUD. Beberapa kegiatan terkait rencana penerapan BLUD dan kebijakan pengelolaan BLUD, antara lain:

- 1) Rapat koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri atas status Direktur UPT. Solo Technopark
- 2) Penyusunan kajian rencana perubahan badan hukum UPT. Kawasan Sains dan Teknologi
- 3) Rapat koordinasi rencana penerapan BLUD pada UPT. Kawasan Wisata

Sementara sesuai dengan pasal; 12 Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pembina teknis BLUD adalah kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan dan Pembina keuangan adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Oleh karena itu Bagian Perekonomian dan SDA akan selalu berkoordinasi dengan kedua Pembina tersebut.



Berikut Unit Pengelola Teknis di beberapa Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yaitu:

Tabel 4. 25 UPT yang Menerapkan PPK-BLUD di Kota Surakarta

No	Nama Dinas	Nama UPT
1	Dinas Kesehatan	(1) Puskesmas Sibela (2) Puskesmas Sangkrah (3) Puskesmas Penumping (4) Puskesmas Jayengan (5) Puskesmas Nusukan (6) Puskesmas Purwodiningratan (7) Puskesmas Pajang (8) Puskesmas Kratonan (9) Puskesmas Pucangsawit (10) Puskesmas Setabelan (11) Puskesmas Gajahan (12) Puskesmas Ngoresan (13) Puskesmas Manahan (14) Puskesmas Gilingan (15) Puskesmas Purwosari (16) Puskesmas Banyuanyar (17) Puskesmas Gambirsari (18) RSUD Bung Karno (19) RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta
2	Dinas Perhubungan	(20) UPT. Transportasi
3	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(21) UPT. Kawasan Sains dan Teknologi (Solo Techno Park)



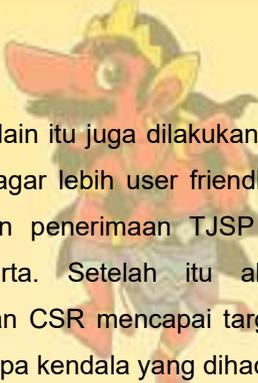
H.5. TJSP atau CSR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), negara mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). CSR merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan swasta terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar yang juga berkontribusi positif dalam pelestarian lingkungan dan budaya, mengurangi masalah sosial, seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, kurangnya fasilitas kesehatan, dan Pendidikan.

Dalam rangka fasilitasi CSR atau TJSP di Kota Surakarta, dilakukan melalui diskusi dan rapat koordinasi untuk sinkronisasi program TJSP dan sosialisasi TJSP sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-A Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta pembuatan aplikasi E-TJSP, dengan harapan :

- 1) Membangun kepercayaan kepada Pengusaha
- 2) Transparansi dalam pengelolaan CSR
- 3) Mempercepat dan mempermudah pelayanan
- 4) Meminimalkan penyimpangan
- 5) Efisiensi SDM, Waktu, Kesehatan, Materi





Selain itu juga dilakukan pengembangan aplikasi e-TJSP agar lebih user friendly untuk pencatatan usulan maupun penerimaan TJSP kepada Pemerintah Kota Surakarta. Setelah itu akan Persentase realisasi kegiatan CSR mencapai target. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu :

- 1) Perlu Koordinasi untuk memadukan, mensinkronisasi dan mengharmonisasikan Program pelaksanaan TJSP dengan kebijakan dan program skala prioritas pembangunan daerah (terutama dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan);
- 2) Belum optimalnya tugas dan fungsi Forum TJSP;
- 3) Masih banyak penerima dan pelaksana TJSP yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP ke Forum TJSP;
- 4) Kurangnya informasi bahwa penyerahan TJSP kepada Pemkot/Perangkat Daerah hanya berupa barang (pengadaan dapat dilakukan oleh pihak pelaksana TJSP sendiri atau menunjuk pihak ketiga dibantu oleh Perangkat Daerah).
- 5) Optimalisasi penggunaan aplikasi e-TJSP.

Berikut data realisasi TJSP yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga di Tahun 2021 – 2022:

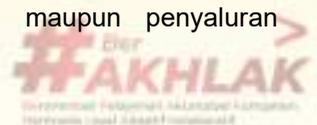


Tabel 4. 26 Jumlah Penerimaan CSR di Kota Surakarta

Tahun	Jumlah Pemberi Bantuan	Jumlah Total Bantuan (Rp)
2021	118 Lembaga/Perusahaan	Rp 20.177.464.438,- dan Rp. 98.270
2022	25 Lembaga/Perusahaan	Rp 9.888.176.915,-

Dapat diperhatikan bahwa perusahaan/lembaga yang memberikan TJSP dan total bantuan dalam rupiah pada tahun 2021 sangat tinggi, berbeda jauh dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021, perusahaan maupun lembaga berlomba - lomba untuk memberikan bantuan kepada masyarakat selama pandemi covid-19 terjadi. Sedangkan pada tahun 2022 bantuan untuk penanganan Covid mulai berkurang, sehingga nilai total bantuan mulai berkurang.

Bagian Perekonomian dan SDA sesuai tugas dan fungsinya untuk fasilitasi TJSP mengupayakan realisasi TJSP yang tepat sasaran dan sesuai dengan tema visi misi Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu, secara berkala melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perusahaan/lembaga untuk dapat menyalurkan TJSP di Kota Surakarta. Penggunaan aplikasi e-TJSP merupakan salah satu sarana untuk mempermudah perusahaan/Lembaga maupun masyarakat dalam permintaan maupun penyaluran TJSP.





Gambar 4. 14 Aplikasi e-TJSP

IV.I. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pengadaan Barang & Jasa adalah Unit Organisasi Pemerintah Non Struktural yang bersifat permanen, yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surakarta secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPBJ merupakan salah satu dari sembilan bagian di Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

Salah satu tugas Bagian Pengadaan Barang & Jasa adalah melakukan proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Berikut capaian Bagian Pengadaan Barang & Jasa Setda Kota Surakarta dalam menyelesaikan tender.



The Spirit of Java





Tabel 4. 27 Jumlah tender terselesaikan Tahun Anggaran 2021 dan 2022

No	Nama Paket	2021	2022
1	Pekerjaan Konstruksi	82	90
2	Jasa Konsultansi	26	39
3	Pengadaan Barang	45	24
4	Jasa Lainnya	40	44
Total		193	197

Jika dilihat dari tabel diatas, jumlah paket pekerjaan tender yang terselesaikan dari tahun 2021 dan 2022 meningkat sebesar 2%. terselesaikannya tender-tender tersebut tidak lepas dari beberapa faktor seperti penyusunan dokumen perencanaan maupun dokumen pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jelas, detail dan terperinci serta pokja pemilihan memperhatikan dan memastikan persyaratan kualifikasi serta penawaran yang akan ditetapkan, konsisten dalam melaksanakan evaluasi terhadap penawaran penyedia. Untuk rincian efisiensi anggarannya, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.





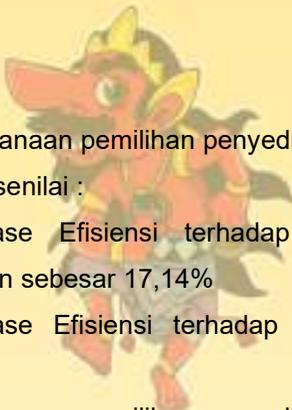
Tabel 4. 28 Efisiensi Anggaran pada Tender yang terselesaikan TA 2021

No	Jenis	Jumlah Paket	Pagu (Rp.)	HPS (Rp.)	Negosiasi (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Pekerjaan Konstruksi	82	255.119.145.316,00	252.091.637.892,23	203.068.087.623,21	52.051.057.692,79
2	Pengadaan Barang	45	37.865.958.933,00	37.342.012.275,31	35.196.380.821,00	2.669.578.112,00
3	Jasa Lainnya	40	39.577.948.998,00	38.734.798.215,77	36.230.363.356,66	3.347.585.641,34
4	Jasa Konsultansi BU Non Konstruksi	25	9.752.488.180,00	9.657.388.452,48	9.113.454.305,00	639.033.875,00
5	Jasa Konsultansi BU Konstruksi	1	189.427.984,00	189.303.650,80	169.290.000,00	20.137.984,00
	Total	193	342.504.969.411,00	338.015.140.486,59	283.777.576.105,87	58.727.393.305,13



Tabel 4. 29 Efisiensi Anggaran pada Tender yang terselesaikan TA 2022

No	Jenis	Jumlah Paket	Pagu (Rp.)	HPS (Rp.)	Negosiasi (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Pekerjaan Konstruksi	90	299.128.147.084,00	296.597.610.840,62	249.955.954.260,53	49.172.192.823,47
2	Pengadaan Barang	44	45.734.463.368,00	45.166.052.881,01	42.591.652.253,40	3.142.811.114,60
3	Jasa Lainnya	24	19.763.634.740,00	19.609.712.647,11	18.095.824.199,32	1.667.810.540,68
4	Jasa Konsultansi BU Non Konstruksi	20	7.299.458.750,00	7.277.163.488,11	6.887.464.040,00	411.994.710,00
5	Jasa Konsultansi BU Konstruksi	19	7.971.901.000,00	7.949.645.509,00	7.666.583.115,00	305.317.885,00
Total		197	379.897.604.942,00	376.600.185.365,85	325.197.477.868,25	54.700.127.073,75



Atas pelaksanaan pemilihan penyedia Tahun Anggaran 2021 terdapat efisiensi senilai :

- a. Persentase Efisiensi terhadap Nilai Total Pagu Anggaran sebesar 17,14%
- b. Persentase Efisiensi terhadap Nilai HPS sebesar 17,37%

Atas pelaksanaan pemilihan penyedia Tahun Anggaran 2022 terdapat efisiensi senilai :

- a. Persentase Efisiensi terhadap Nilai Total Pagu Anggaran sebesar 14,39%
- b. Persentase Efisiensi terhadap Nilai HPS sebesar 14,52%

Melalui terpenuhinya 17 Standar LPSE, Bagian Pengadaan Barang & Jasa menunjukkan komitmennya dalam melayani OPD di Kota Surakarta. Terpenuhinya 17 Standar LPSE ini, diharapkan dapat meningkatkan keamanan data, mutu pelayanan, dan akuntabilitas dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain menyelesaikan tender, Bagian Pengadaan Barang & Jasa juga melakukan pendampingan, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada pelaku pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini bertujuan agar pelaku pengadaan lebih memahami dan meningkatnya kompetensi mengenai rencana-rencana umum pengadaan.



The Spirit of Java



BAB V PENUTUP

Buku Profil disusun untuk memberikan gambaran umum profil perangkat daerah yang meliputi visi misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Buku ini juga menyediakan data dan informasi meliputi data capaian kinerja dan data statistik yang dikelola 9 (Sembilan) Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Surakarta di Tahun 2022.

Data yang disajikan sesuai dengan indikator yang ada di dokumen RPJMD, RENSTRA, LPPD, LKJIP, LKPJ dan SDG'S yang sebagian telah disajikan dalam portal SOLODATA. Sebagai sarana publikasi diharapkan data dan informasi yang tersaji dalam Buku Profil Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 dapat bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kajian maupun sebagai data pendukung dalam perumusan kebijakan.



Surakarta, Maret 2023

IRAH ANI, MA



The Spirit of Java





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2 Surakarta 57111

Telp. (0271) 644315 Fax. (0271) 644308

Website : <https://www.surakarta.go.id>



K/23.3372.004